



**EKSISTENSI ASOSIASI PETANI TEMBAKAU
INDONESIA CABANG KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2001-2014**

SKRIPSI

Oleh

MOHAMMAD RIANDI

NIM. 120110301050

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**EKSISTENSI ASOSIASI PETANI TEMBAKAU
INDONESIA CABANG KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2001-2014**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Humaniora

Oleh

MOHAMMAD RIANDI

NIM. 120110301050

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Riandi

NIM : 120110301050

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah yang berjudul “Eksistensi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Cabang kabupaten Bondowoso Tahun 2001-2014” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali yang saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan ke institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Oktober 2019

Yang Menyatakan

Mohammad Riandi

NIM. 120110301050

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diajukan oleh :

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Dr, Tri Chandra Aprianto, M.Hum
NIP : 197304262003121001

Dr. Sri Ana Handayani, M.Si.
NIP : 196009191986022001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Eksistensi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Cabang Kabupaten Bondowoso Tahun 2001-2014” telah disetujui dan disahkan oleh Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Oktober 2019

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Tri Chandra Aprianto, M.Hum

NIP :197304262003121001

Anggota 1,

Dr. Sri Ana Handayani, M.Si.

NIP :196009191986022001

Anggota 2,

Dr. RetnoWinarni, M.Hum.

NIP :195906281987022001

Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum.

NIP :1971108251999031001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

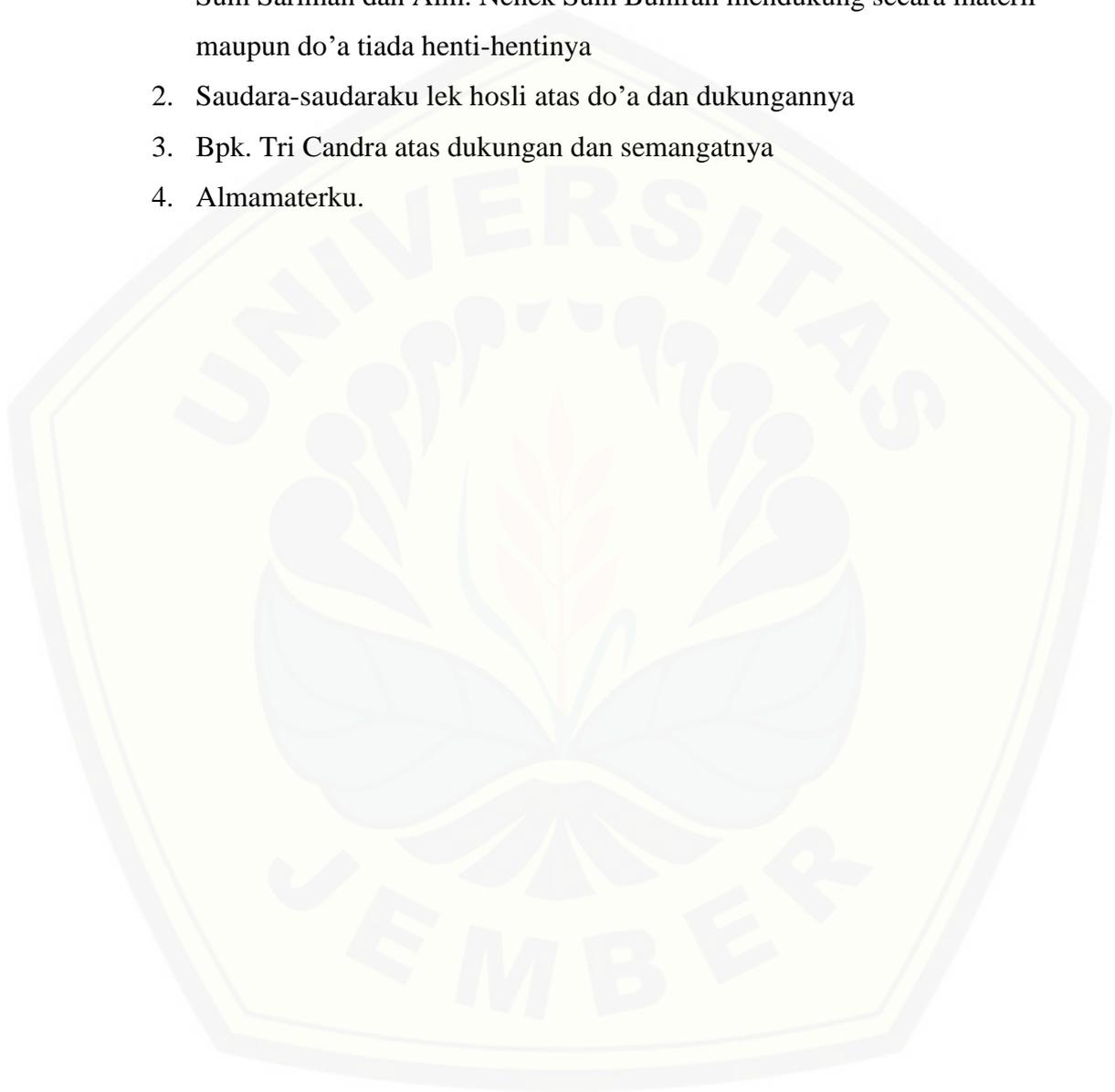
Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum

NIP . 196805161992011001

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

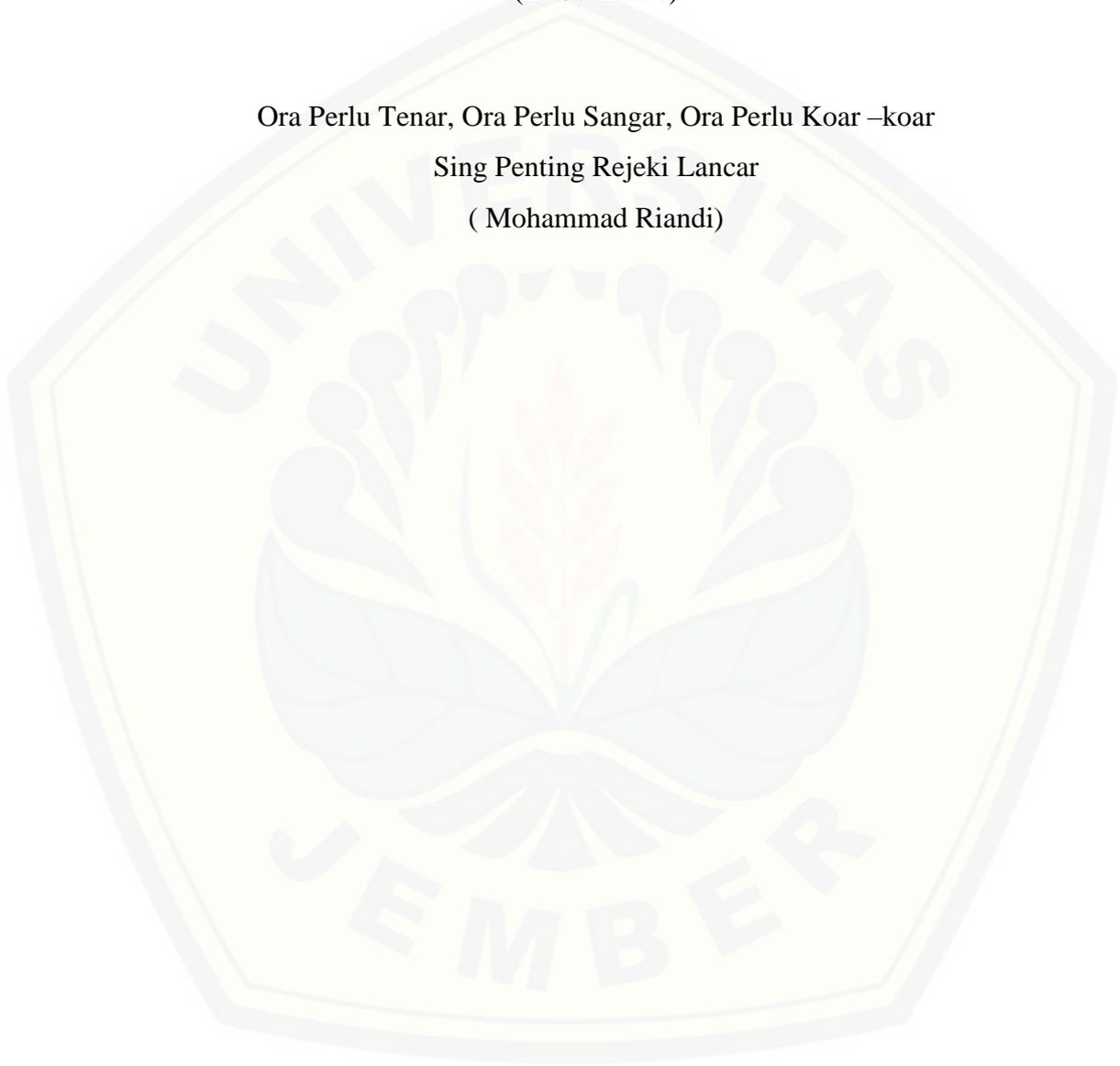
1. Orang tuaku tercinta, Moh, Husni dan Suma Atun dan keluargaku, Kakek Sum Sariman dan Alm. Nenek Sum Bunirah mendukung secara materil maupun do'a tiada henti-hentinya
2. Saudara-saudaraku lek hosli atas do'a dan dukungannya
3. Bpk. Tri Candra atas dukungan dan semangatnya
4. Almamaterku.



MOTTO

Gantungkan Cita-citamu setinggi Langit. Bermimpilah setinggi Langit.
Jika Engkau jatuh, Engkau akan jatuh diantara Bintang – bintang.”
(Ir. Soekarno)

Ora Perlu Tenar, Ora Perlu Sangar, Ora Perlu Koar –koar
Sing Penting Rejeki Lancar
(Mohammad Riandi)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang Eksistensi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Cabang Kabupaten Bondowoso Tahun 2001-2014. Berdirinya (APTI) Cabang Kabupaten Bondowoso memberikan dampak positif bagi petani tembakau, sehingga tidak ada lagi permainan pasar hasil budidaya tembakau. Seperti tengkulak, belandang dan pengepul.

Skripsi adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Setelah melakukan beberapa kali diskusi dengan para Dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan eksplorasi berbagai sumber, akhirnya penulis menetapkan eksistensi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Kabupaten Bondowoso sebagai judul. Kerja keras dalam penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar Sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Penyusun sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sofyan, M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
2. Prof. Drs. Nawianto, M.A., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah,
3. Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing akademik yang sudah banyak memberikan bimbingan penyemangat kepada penulis,
4. Dr. Tri Chandra Aprianto, M.Hum., selaku Dosen pembimbing 1, yang memberikan banyak arahan dan saran, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam penulisan skripsi ini,
5. Dr. Sri Ana Handayani, M.Si., selaku Dosen pembimbing 2, yang telah memberikan saran, masukan, serta semangat kepada penulis,

6. Dr. Retno Winarni, M.Hum., selaku dosen penguji 1, yang telah meberikan saran, masukan, serta motivasi kepada penulis,
7. Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum., selaku dosen penguji 2, yang telah memberikan saran, masukan, serta semangat kepada penulis,
8. Para anggota apti bondowoso terutama kepada bpak yasit yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam membantu menemukan data dalam mempermudah didalam penelitian,
9. Mas ridwan dan mas heru staf jurusan sejarah, dan seluruh karyawan fakultas ilmu budaya Universitas jember, yang membantu segala bentuk adminis trasi dalam penulisan ini,
10. Kawan-kawan Jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2012 yang banyak memberikan cerita, canda gurau dalam perjalanan selama ini,
11. Semua pihak tidak sempat penulis bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, dukungan dan menambahkan refrensi buku yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Guna kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat kedepannya.

Jember, 22 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABTRACT	xvi
RINGKASAN	xvii
SUMMARY	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat	11
1.4 Ruang lingkup penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka	14
1.6 Pendekatan dan KerangkaTeoritis	16
1.7 Metode Penelitian	18
1.8 Sistematika penulisan	21

BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN	
BONDOWOSO	22
2.1 Kondisi Geografis	22
2.2 Kondisi Demografis	27
2.3 Kondisi sosial ekonomi	32
2.4 Petani Tembakau dan Berdirinya APTI Bondowoso	35
BAB 3 PERAN DAN PENGARUH ASOSIASI PETANI	
TEMBAKAU INDONESIA CABANG BONDOWOSO	42
3.1 Kepengurusan APTI Cabang Bondowoso	42
3.2 Peranan APTI Cabang Bondowoso Terhadap Petani Tembakau	48
3.3 Hadirnya APTI Terhadap Dinamika Tanaman Petani tembakau	57
3.4 Dampak Adanya APTI Terhadap Petani Tembakau	64
BAB 4 KESIMPULAN	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR ISTILAH

- Belandang : Seorang tengkulak yang melakukan pembelian langsung terhadap hasil tembakau rakyat dengan harga yang relative murah dibandingkan dengan harga pabrikan.
- Devisa : Alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri.
- Ekspor : Pengiriman barang dagangan keluar negeri.
- Eksportir : Pengekspor.
- Feodal : Susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan.
- Importir : Pengiriman lintas dalam negeri.
- Komoditi : Jenis tumbuhan tanaman perkebunan.
- Komunal : Milik rakyat atau umum.
- Pengepul : pedagang perantara sebutan petani tembakau di Kabupaten Bondowoso.
- Produktif : Bersifat atau mampu menghasilkan.
- Produktivitas : Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi.

DAFTAR SINGKATAN

APTI	: Asosiasi Petani Tembakau Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
APTB	: Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso
PMU	: Proyek Menejen Unit
SK	: Surat Keterangan
WHO	: <i>World Health Organization</i>
FCTC	: <i>Framework Convetion onTobacco Control</i>

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Bondowoso Tahun 2000	24
Tabel 2.2	Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2000	26
Tabel 2.3	Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Bondowoso Tahun 1996-2000	29
Tabel 2.4	Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Agama Tahun 2002	35
Tabel 2.5	Hasil Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2000	40
Tabel 3.1	Waktu dan Sebaran Lokasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perencanaan Areal Tembakau di Kabupaten Bondowoso	52
Tabel 3.2	Jumlah Perusahaan Rokok di Kabupaten Bondowoso tahun 2012	55
Tabel 3.3	Data Luas Dan Produksi Tanaman Tembakau Rakyat Kabupaten Bondowoso Tahun 2001 – 2013	61
Tabel 3.4	Alokasi Bantuan Hibah Pupuk dan Peralatan Modal Kerja Di Kabupaten Bondowoso	64
Gambar 1	Diagram Alur Pemasaran Tembakau	58

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Peta Kabupaten Bondowoso	75
Lampiran B	Struktur Organisasi Apti DPC kabupaten Bondowoso	76
Lampiran C	Berita Acara Pembentukan Pengurus APTI	77
Lampiran D	Surat Keterangan Terdaftar APTI	74
Lampiran E	Surat Keterangan Terdaftar NPWP APTI	75
Lampiran F	Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Pengurus APTI DPC Kabupaten Bondowoso	76
Lampiran G	Surat Pendaftaran Ciptaan	77
Lampiran H	Asosiasi Petani Tembakau Indonesia	78
Lampiran I	Dokumentasi Narasumber dan Penulis	80

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang “eksistensi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia di Kabupaten Bondowoso Tahun 2001-2014” dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan sosiologi ekonomi. Kabupaten Boondowoso merupakan salah satu sentra perkebunan tembakau dengan kelompok petani tembakau yang cukup aktif yang terbentuk dalam ikatan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Pada dasarnya keberadaan APTI dari tahun 2001 memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan petani tembakau di Bondowoso, baik dari jumlah lahan dan hasil produksi tanaman tembakau rakyat yang semakin meningkat. APTI juga menjadi jembatan penting dalam menyampaikan aspirasi para petani tembakau Bondowoso. Keberadaan APTI di Kabupaten Bondowoso memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi maupun sosial.

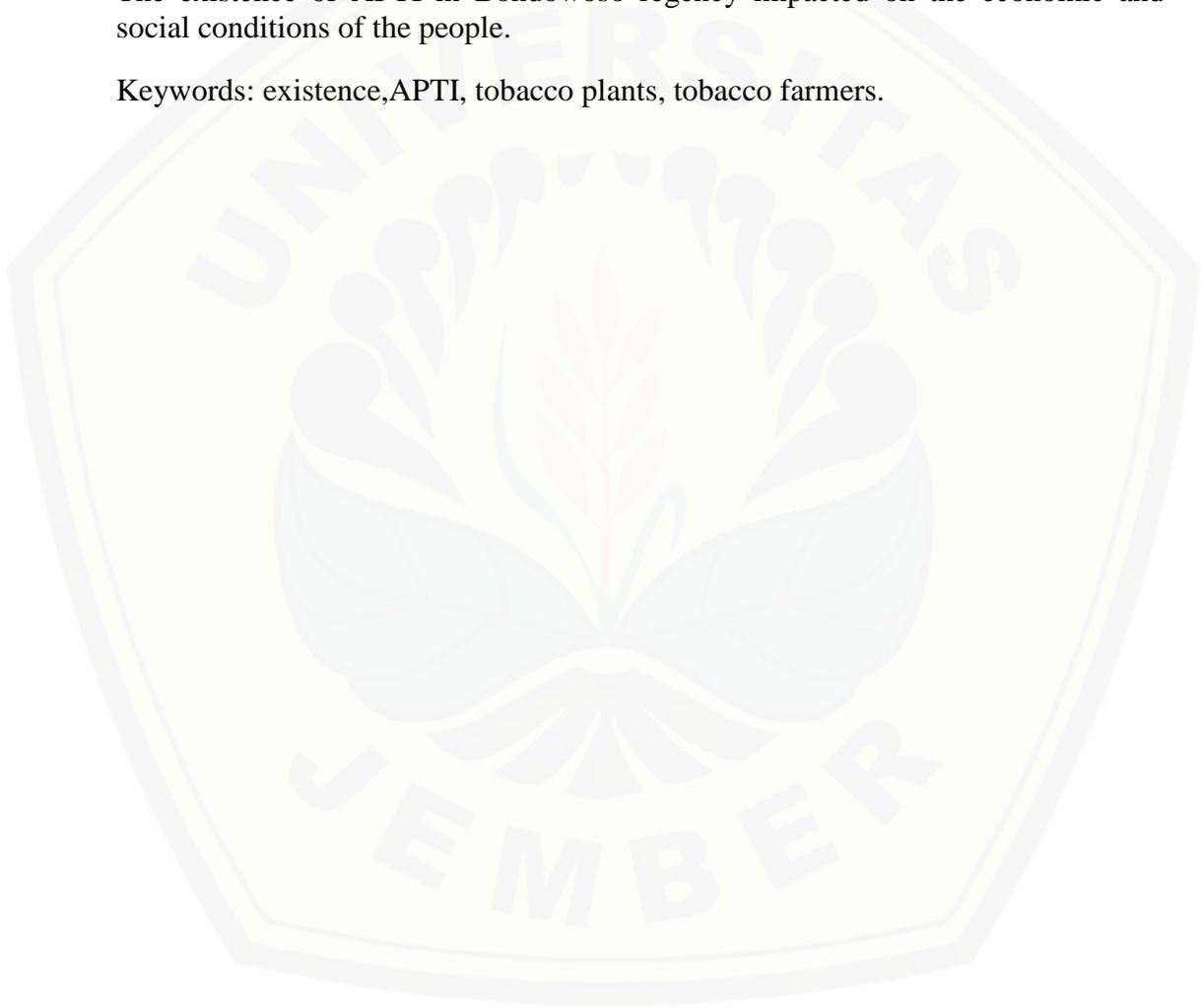
Kata kunci : eksistensi, APTI, tanaman tembakau, dan petani tembakau.



ABSTRACT

This study discusses the existence of Indonesian Association of Tobacco Farmers in Bondowoso regency, 2001-2014” by using historical method and economical sociology approach. Bondowoso regency has been one of the centres of tobacco plantation with an active group of tobacco farmers forming *Asosiasi Petani Tembakau Indonesia* (APTI). In principle, the existence of APTI in 2001 brought a positive influences on the development of tobacco in Bondowoso, in terms of areas and outputs of farm tobacco that has been increasing. APTI also serve as an important bridge in delivering the aspirations of Bondowoso’s tobacco farmers. The existence of APTI in Bondowoso regency impacted on the economic and social conditions of the people.

Keywords: existence, APTI, tobacco plants, tobacco farmers.



RINGKASAN

**Eksistensi Asosiasi Petani Tembakau Di Kabupaten Bondowoso: Kajian
Ekonomi Tahun 2001 – 2014**

Mohammad Riandi, 120110301050; 2019; Jurusan Ilmu Sejarah; Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Jember

Secara keseluruhan skripsi ini menjelaskan tentang eksistensi APTI terhadap petani tembakau di Bondowoso. Oleh karena Bondowoso merupakan salah satu sentra tembakau rakyat di Jawa Timur. Akan tetapi faktor kesejarahan munculnya petani tembakau tidak bisa dihilangkan begitu saja. Di Bondowoso sejarah adanya perusahaan perkebunan tembakau Milik pengusaha Belanda, mengakibatkan banyak rakyat pribumi dipaksa untuk mengolah lahan di perkebunan tembakau di daerah Karesidenan Besuki, seperti Jember dan Bondowoso, dan mereka-pun menjadi buruh pekerja di perkebunan tembakau. Akhirnya mereka secara turun-temurun terus menempati tempat tersebut sehingga terbentuk lingkup pedesaan yang berada di wilayah perkebunan tembakau, sedang masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai petani. Lambat laun masyarakat Madura yang bekerja di perkebunan tembakau, mulai menanam tembakau secara mandiri.

Tanaman tembakau rakyat dalam perkembangannya semakin mendapat perhatian dari pemerintah seperti Dinas Perkebunan karena dipandang memiliki potensi ekonomi yang besar. Sebagaimana pada Era Orde Baru merupakan era pembangunan bagi Indonesia. Oleh karenanya pihak Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian menempatkan sektor pertanian, seperti pertanian tanaman pangan dan perkebunan menjadi prioritas pembangunan karena dipandang memiliki potensi ekonomi yang besar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditi tembakau rakyat pihak pemerintah, khususnya Dinas Perkebunan juga ikut terlibat langsung. Tindakan yang dilakukan Dinas Perkebunan yaitu dengan cara membentuk PMU

(ProyekManajemen Unit) berbasis komoditi tanaman perkebunan, seperti tembakau, tebu dan kopi.

Turut campur pemerintah dalam pengusahaan tanaman tembakau milik petani semakin menemukan bentuknya manakala terbentuk organisasi tani yaitu Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Khususnya di wilayah Jawa Timur APTI didirikan pada tahun 2000 di Surabaya. Adapun latar belakang berdirinya APTI karena adanya keresahan para petani tembakau pada saat musim tanam dan panen tembakau.

Ketika pemerintah secara langsung turut ikut campur dan memberikan peran penting dalam pengusahaan tanaman tembakau terhadap petani, akibatnya secara lambat laun tanaman tembakau di Bondowoso semakin mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada dasarnya tanaman tembakau juga mempunyai sifat yang sangat khusus seperti tanaman ekspor yang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanaman tembakau rakyat yang ada di Indonesia sangat memiliki kontribusi penting dalam penyumbang devisa Negara karena tanaman tembakau rakyat memiliki areal yang tidak kalah luasnya dengan perkebunan tembakau milik pemerintah, begitu pula dalam hasil produksinya.

Sejak berdirinya APTI di Jawa Timur hal ini kemudian memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan tanaman tembakau rakyat. Seperti halnya eksistensi tanaman tembakau rakyat di Kabupaten Bondowoso yang semakin berkembang. Perkembangan tembakau rakyat di Bondowoso kemudian memberikan respon positif kepada para petani untuk membentuk sebuah organisasi tani yang berbasis komoditi tembakau. Dalam rangka untuk meninjau dan mendampingi perkembangan tanaman tembakau rakyat, maka pada tahun 2001 perwakilan petani tembakau di Kabupaten Bondowoso secara mufakat telah mendirikan sebuah perkumpulan petani tembakau. Tepatnya pada hari rabu 23 Mei 2001 terbentuklah Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso (APTB).

Kendatipun jelas bahwa Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso menjadi penting keberadaanya, terutama dalam melindungi dan menjembatani aspirasi petani tembakau. Bagaimanapun juga tembakau sudah menjadi bagian dari tanaman tradisi masyarakat, maka menjadi suatu kemustahilan bagi pemerintah

untuk mematikan usahatani tersebut. Meski sering pula pemerintah mengeluarkan peraturan yang terkesan mendiskreditkan dan memojokkan petani tembakau maupun industri rokok nasional.

Seiring berjalan waktu yang cukup panjang, keberadaan Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso kemudian mengalami pergantian kepengurusan. Pergantian kepengurusan tersebut dilaksanakan pada hari rabu 05 November 2014 yang bertempat di Aula Maesan 1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso yang dihadiri dengan peserta musyawarah sebanyak 61 orang kelompok tani tembakau. Dari hasil musyawarah tersebut terbit sebuah keputusan dan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Bondowoso yang baru.

SUMMARY

The Existence of Tobacco Farmers Association in Bondowoso Regency: Economic Study in 2001 – 2014; Mohammad Riandi, 120110301050; 2019; History Department; Faculty of Cultural Sciences, University of Jember

Overall, this study explains the existence of APTI linked to tobacco farmers in Bondowoso. Because Bondowoso has been one of the people's tobacco centers in East Java. However, the historical factor of the emergence of tobacco farmers cannot be eliminated. In Bondowoso the history of the existence of a tobacco plantation company belonging to the Dutch, resulting in many indigenous people being forced to cultivate land in tobacco plantations in the Besuki Residency area, such as Jember and Bondowoso, and they became laborers on tobacco plantations. Finally, they continued to occupy this place for generations to form a rural sphere in the area of tobacco plantations, while the majority of the people worked as farmers. Gradually the Madurese who worked on tobacco plantations began to grow tobacco independently.

In the development of smallholder tobacco plants increasingly get the attention of the government such as the Plantation Office because it is considered to have great economic potential. As in the New Order Era, it was an era of development for Indonesia. Therefore, the Department of Agriculture and the Department of Agriculture put the agricultural sector, such as food crop agriculture and plantations a development priority because they are considered to have great economic potential to create the welfare of rural communities.

In the context of increasing the productivity of people's tobacco commodities, the government, especially the Plantation Office, also got directly involved. The action taken by the Plantation Office was by establishing a PMU (Project Management Unit) based on estate crop commodities, such as tobacco, sugar cane and coffee.

Government intervention in the cultivation of tobacco plants owned by farmers increasingly found its shape when a farmer organization was formed, the

Indonesian Tobacco Farmers Association (APTI). Specifically in the East Java region APTI was established in 2000 in Surabaya. As for the background of the establishment of APTI was because of the unrest of tobacco farmers during the planting season and tobacco harvest.

When the government directly intervened and gave an important role in the exploitation of tobacco plants to farmers, the consequence was that gradually the tobacco plants in Bondowoso increasingly experienced significant developments. Basically, tobacco plants also have very special properties like other export crops. It can even be said that the people's tobacco plants in Indonesia have a very important contribution to the country's foreign exchange because the smallholder tobacco plants have an area that is no less extensive than the government-owned tobacco plantations, as well as in their production.

Since the establishment of APTI in East Java this has then had a positive influence on the development of smallholder tobacco plants. Like the existence of smallholder tobacco plants in the growing Bondowoso Regency. The development of people's tobacco in Bondowoso then gave a positive response to farmers to form a tobacco-based farmer organization. In order to review and assist the development of smallholder tobacco plants, in 2001 representatives of tobacco farmers in Bondowoso District agreed to establish a tobacco farmer association. Precisely on Wednesday May 23 2001 the Bondowoso Tobacco Farmers Association was formed (APTB).

Although it is clear that the Bondowoso Tobacco Farmers Association was important, especially in protecting and bridging the aspirations of tobacco farmers. However tobacco has become part of the community's traditional plants, it becomes an impossibility for the government to kill the farm. Although the government often issues regulations that seem to discredit tobacco farmers and the national cigarette industry.

Over a fairly long time, Bondowoso Tobacco Farmers Association then experienced a change of management. The management changes were carried out on Wednesday, November 5, 2014, which took place in the Maesan Hall 1 of the Forestry and Plantation Office of Bondowoso Regency, which was attended by 61

participants of the tobacco farmer group. From the results of the meeting a decision was made and the Branch Tobacco Farmers Association (DPC) of the Indonesian Bondowoso Farmers Association was established.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Masyarakat petani di Indonesia sering digambarkan sebagai komunal agraris yang tertutup, berbudaya homogen, dan didominasi oleh ikatan tradisional dengan struktur supra-desa yang bersifat feodal dan kolonial. Hubungan feodal tersebut yang membagi masyarakat ke dalam dua kelas, yaitu kelas produktif dan kelas konsumtif, menjadikan petani sebagai pemasok barang dan layanan kepada kelas atas.¹ Pada umumnya masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem pertanian sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. Selama kurang lebih dua ribu tahun masyarakat Indonesia secara bertahap telah mengembangkan dua tipe kegiatan pertanian, yaitu kegiatan pertanian yang menggarap tanaman subsisten dan yang menggarap tanaman perdagangan, seperti tembakau.²

Tanaman tembakau merupakan tanaman tropis dari Amerika, dimana bangsa pribumi menggunakan tembakau sebagai acara upacara adat dan

¹ Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani* (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1993), hlm. 3.

² Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Pekebunan Di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. 15.

pengobatan. Tembakau pertamakali ditemukan dari Amerika Utara dan masuk ke Eropa melalui Spanyol. Awalnya tembakau digunakan untuk kepentingan kesehatan. Akan tetapi setelah masuk ke Eropa tanaman tembakau mulai dikenal dengan populer dan digunakan sebagai bahan perdagangan, sehingga tembakau menyebar ke seluruh Eropa, Asia, Afrika, dan Australia.³ Tanaman tembakau termasuk dalam kategori tanaman perkebunan semusim yang sangat cocok dan berkembang di daerah subtropis.⁴

Awalnya tanaman tembakau di Indonesia yaitu sekitar 1600-1830-an pada masa itu tembakau hanya dijadikan sebagai usaha kecil-kecilan dan persebahan kepada penguasa kerajaan.⁵ Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan tembakau. Pada tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan sistem tanam paksa. Maksud diterapkannya tanam paksa adalah untuk mendapatkan komoditi-komoditi yang akan dapat dijual di pasaran dunia, dan untuk itu tanam paksa memakai lahan dan tenaga kerja dari orang-orang desa di Jawa.⁶ Selama sistem tanam paksa diterapkan di Indonesia perkebunan tembakau semakin berkembang dengan pesat. Tanaman tembakau ini juga berkembang di wilayah karesidenan Besuki, seperti Jember dan Bondowoso.

Perkebunan tembakau yang berkembang pesat dan menjadi andalan komoditas tanaman ekspor adalah tembakau cerutu. Pengusahaan tembakau tersebut paling besar di Deli Sumatera, Klaten Jawa Tengah, dan di daerah Karesidenan Besuki. Salah satu tempat perkebunan tembakau di daerah Besuki adalah Bondowoso. Dalam rangka menginvestasikan modalnya, para pengusaha

³ Soeginjanto Padmo dan Edhie Djatmiko, *Tembakau: Kajian Sosial Ekonomi*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 2.

⁴ Dewa Ngakan Cakrabawa dan Leli Nuryati, *Outlook Komoditi Tembakau* (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian, 2014), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

⁶ Robert Van Niel, *Warisan Sistem Tanam Paksa*, dalam Anne Booth, *et.al.*, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 125.

Belanda mulai memperluas usahanya di Kabupaten Bondowoso dengan cara mengajukan hak sewa (*opstal*) di berbagai distrik afdeling Bondowoso.

Pertama C.H. Doup dan J.G. Berkholst pengusaha tembakau asal Belanda yang sejak tahun 1850-an telah menyewa tanah-tanah penduduk. Pengajuan hak sewa dari tuan C.H. Doup dan J.G. Berkholst pada tahun 1860 kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan ijin atas hak sewa tanah seluas 30 bau di wilayah distrik Bondowoso.

Kedua, Fransen van de Putte bekerjasama dengan van Th. AN Lorenty membuka perusahaan perkebunan tembakau sejak tahun 1850-an di afdeling Bondowoso. Melihat usaha tanaman tembaka semakin berkembang pada tahun 1856 Fransen van de Putte juga mengajukan hak sewa di daerah Penanggungan seluas 60 bau.

Ketiga, pada tahun 1853 D.J. Uhlenbeck pengusaha tembakau *Na Oogst* afdeling Bondowoso di daerah Jelbuk yang menjadi bagian dari daerah Maesan dengan luas lahan sewa mencapai 106 bau. Untuk memperlancar usaha perkebunan tembakau, pihak pengusaha perkebunan Belanda membutuhkan tenaga kerja yang memadai. Salah satu tenaga kerja perkebunan tembakau untuk daerah Besuki umumnya didatangkan dari Pulau Madura.⁷

Setelah memasuki usia satu setengah dekade, Sistem Tanam Paksa menghadapi berbagai kritik dari hampir semua kekuatan ideologi politik yang ada di negeri Belanda. Akibat dari tanam paksa yang diterapkan Belanda memberikan dampak yang negatif, dimana birokrasi negara menjadi sangat otoriter dan penduduk pribumi mengalami degradasi kehidupan sosial-ekonomi. Akhirnya pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihapuskan.⁸

Sementara itu di wilayah perkebunan tembakau Bondowoso, penduduk lokal yang memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat yang ada di Pulau Madura mereka mulai mengajak saudaranya untuk terlibat dalam pembudidayaan

⁷ Tri Chandra Aprianto, "Dekolonisasi Perkebunan di Jember Tahun 1930an-1960an" *Tesis* Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011, hlm. 43.

⁸ Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. 190.

tembakau. Arus migrasi orang-orang Madura ke daerah Karesidenan Besuki, seperti Situbondo, Bondowoso, dan Jember melalui pelabuhan Panarukan.⁹ Adanya perusahaan perkebunan tembakau mengakibatkan banyak rakyat pribumi dipaksa untuk mengolah lahan di perkebunan tembakau di daerah Karesidenan Besuki, seperti Jember dan Bondowoso, dan mereka-pun menjadi buruh pekerja di perkebunan tembakau. Akhirnya mereka secara turun-temurun terus menempati tempat tersebut sehingga terbentuk lingkup pedesaan yang berada di wilayah perkebunan tembakau, sedang masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai petani. Lambat laun masyarakat Madura yang bekerja di perkebunan tembakau, mulai menanam tembakau secara mandiri. Akan tetapi para buruh perkebunan tersebut, juga diberikan sebagian tanah untuk menanam tanaman tembakau. Sementara hasil panennya juga dibeli oleh pihak pengusaha perkebunan.¹⁰

Tanaman tembakau rakyat dalam perkembangannya semakin mendapat perhatian dari pemerintah seperti Dinas Perkebunan karena dipandang memiliki potensi ekonomi yang besar. Sebagaimana pada Era Orde Baru merupakan era pembangunan bagi Indonesia. Oleh karenanya pihak Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian menempatkan sector pertanian, seperti pertanian tanaman pangan dan perkebunan menjadi prioritas pembangunan karena dipandang memiliki potensi ekonomi yang besar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditi tembakau rakyat pihak pemerintah, khususnya Dinas Perkebunan juga ikut terlibat langsung. Tindakan yang dilakukan Dinas Perkebunan yaitu dengan cara membentuk Proyek Manajemen Unit (PMU) berbasis komoditi pada tahun 1976/1977. Selanjutnya PMU tembakau berkembang di daerah sentra perkebunan tembakau, seperti daerah Kabupaten Bondowoso, Bojonegoro, Lumajang, Probolinggo, Pamekasan, dan Sumenep. Kebijakan dan peran aktif organisasi pemerintah yang demikian

⁹ Tri Chandra Aprianto, *op.cit.*, hlm. 31.

¹⁰ Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko, *Tembakau: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 33.

kemudian merespon perkembangan perkebunan tembakau rakyat.¹¹ Begitupula hasil dari semua komoditas perkebunan tanaman tembakau yang ada di daerah Bondowoso memiliki peranan penting yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Sebagian besar pengusahaan tanaman tembakau di Bondowoso dilakukan oleh petani, baik tembakau jenis *Voor Oogst* maupun tembakau *Na Oogst*.¹²

Turut campur pemerintah dalam pengusahaan tanaman tembakau milik petani semakin menemukan bentuknya manakala terbentuk organisasi tani yaitu Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Khususnya di wilayah Jawa Timur APTI didirikan pada tahun 2000 di Surabaya. Adapun latar belakang berdirinya APTI karena adanya keresahan para petani tembakau pada saat musim tanam dan panen tembakau. Ketika musim panen tembakau tiba para petani selalu mengalami kesulitan untuk menjual hasil panennya. Lemahnya posisi tawar pada pabrikan besar membuat jual tembakau milik petani tertekan manakala musim panen tiba. Untuk itulah dirasa perlu adanya asosiasi yang bisa mendampingi petani, menjadi pelindung dan mitra. Alasan lain berdirinya APTI juga disebabkan semakin merosotnya jumlah areal tembakau di Jawa Timur. Sehingga dengan berdirinya APTI diharapkan mampu mendorong semangat petani untuk menanam tanaman tembakau nantinya.¹³

Ketika pemerintah secara langsung turut ikut campur dan memberikan peran penting dalam pengusahaan tanaman tembakau terhadap petani, akibatnya secara lambat laun tanaman tembakau di Bondowoso semakin mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada dasarnya tanaman tembakau juga mempunyai sifat yang sangat khusus seperti tanaman ekspor yang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanaman tembakau rakyat yang ada di Indonesia sangat memiliki kontribusi penting dalam penyumbang devisa Negara karena tanaman

¹¹ Moch. Samsul Arifien, *Tembakau di Persimpangan Jalan*, (Surabaya: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 2013), hlm. 6.

¹² *Ibid.*, hlm. 5.

¹³ Amin Subarkah, "APTI Jatim Siap di Barisan Terdepan", dalam Moch. Samsul Arifin, *ibid.*, hlm. 89-90.

tembakau rakyat memiliki areal yang tidak kalah luasnya dengan perkebunan tembakau milik pemerintah, begitu pula dalam hasil produksinya. Sementara itu, di daerah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2000 tanaman tembakau rakyat mencapai luas 7.663 hektar.¹⁴

Sejak berdirinya APTI di Jawa Timur hal ini kemudian memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan tanaman tembakau rakyat. Seperti halnya eksistensi tanaman tembakau rakyat di Kabupaten Bondowoso yang semakin berkembang. Perkembangan tembakau rakyat di Bondowoso kemudian memberikan respon positif kepada para petani untuk membentuk sebuah organisasi tani yang berbasis komoditi tembakau. Dalam rangka untuk meninjau dan mendampingi perkembangan tanaman tembakau rakyat, maka pada tahun 2001 perwakilan petani tembakau di Kabupaten Bondowoso secara mufakat telah mendirikan sebuah perkumpulan petani tembakau. Tepatnya pada hari rabu 23 Mei 2001 terbentuklah Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso (APTB). Pada awal berdirinya APTB pertamakali diketuai oleh bapak KH. Halid, dengan wakil ketua 1 H. Faisal, dengan jumlah anggota kesuluruhan sebanyak 32 orang.¹⁵ Pada masa bapak KH. Halid menjabat sebagai ketua APTB ia juga sebagai Sekretaris Desa Tenggarang. Dengan memiliki jabatan yang demikian memberikan kemudahan dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat petani tembakau karena KH. Halid termasuk salah satu tokoh masyarakat yang tentu dipercaya oleh masyarakat sekitar. Sehingga ketika ia menjabat sebagai ketua APTB juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap eksistensi pertanian tembakau di Kabupaten Bondowoso.¹⁶

Hal lain yang tidak bisa kita lupakan begitu saja adalah bahwasanya sejak berdirinya APTB maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif

¹⁴ Moch. Samsul Arifin, "Mekanisasi Pengolahan Tanah dan Pasca Panen Tembakau Rajangan Jawa", *Majalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur*, Surabaya 2013, hlm. iv.

¹⁵ Surat Keterangan (SK) Kesepakatan Petani Tembakau Bondowoso, pada hari rabu 23 mei 2001 di Bondowoso, hlm. 1-3.

¹⁶ Wawancara dengan KH. Halid, Bondowoso 25 februari 2019.

terhadap perkembangan tanaman tembakau rakyat. Sebagaimana perannya untuk melindungi petani, maka sejak berdiri Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) juga mengemban tugas penting terhadap petani. Adapun salah satu tugasnya yakni, APTI memiliki peran untuk menjembatani petani dengan pemerintah dalam hal bantuan terkait komoditi tanaman tembakau, seperti penyuluhan program intensifikasi mutu tembakau. Disini APTI juga berfungsi sebagai jembatan pasar, dalam artian bagaimana industri rokok dapat membeli tembakau milik petani di atas harga resmi. Tidak hanya itu, peran APTI juga memiliki peran yang sangat penting dalam hal regulasi. Manakala terbit undang-undang yang akan menyulitkan petani maka APTI akan terlibat berjuang secara langsung. Contohnya sejak keluarnya Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Antitembakau pada tahun 2012, pihak APTI ikut menolak dan terlibat aktif dalam membuat draf UU antitesis tembakau di tahun 2012.¹⁷

Alhasil pihak pemerintah secara resmi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dengan terbitnya peraturan pemerintah tersebut, baik bagi kalangan petani maupun pihak industri merasa terpojok akan peraturan yang terkesan mendiskreditkan usahatani tanaman tembakau. Namun hal lain tidak demikian yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, dimana pada tahun 2012 pemerintah malah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 585/Kpts/SR.120/2/2012 tentang Pemutihan Tembakau Rajangan Varietas Maesan 1, 2 Sebagai Varietas Unggul.¹⁸

Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut juga tidak lepas dari adanya campurtangan dan aspirasi penting Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso untuk melindungi tanaman tembakau sebagai komoditas andalan bagi masyarakat petani di Bondowoso. Disamping itu sejak dikeluarkan surat keputusan tentang varietas tembakau maesan 1 dan 2 tersebut, maka produksi tembakau milik petani

¹⁷ Amin Subarkah, *op.cit.*, hlm. 91-93.

¹⁸ *Arsip Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso*; tentang Keputusan Menteri Pertanian Nomor 585/Kpts/SR.120/2/2012 tentang Pemutihan Tembakau Rajangan Varietas Maesan 1, 2 Sebagai Varietas Unggul.

di Bondowoso dengan mudah ditampung oleh industri rokok nasional. Kendatipun tembakau Maesan 1 dan 2 menjadi *brand* andalan petani tembakau di Bondowoso secara luas dalam menjual hasil panennya kepada pabrikan rokok.¹⁹ Alhasil di dalam perkembangannya, di daerah Kabupaten Bondowoso telah memiliki dua varietas unggul tembakau rajangan, yaitu Maesan 1 dan Maesan 2. Tanaman tembakau tersebut merupakan tanaman khas masyarakat petani tembakau di Kabupaten Bondowoso.²⁰

Kendatipun jelas bahwa Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso menjadi penting keberadaannya, terutama dalam melindungi dan menjembatani aspirasi petani tembakau. Bagaimanapun juga tembakau sudah menjadi bagian dari tanaman tradisi masyarakat, maka menjadi suatu kemustahilan bagi pemerintah untuk mematikan usahatani tersebut. Meski sering pula pemerintah mengeluarkan peraturan yang terkesan mendiskreditkan dan memojokkan petani tembakau maupun industri rokok nasional. Akan tetapi komoditas tembakau masih menjadi penyumbang devisa negara yang paling banyak bagi negara Indonesia.²¹

Seiring berjalan waktu yang cukup panjang, keberadaan Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso kemudian mengalami pergantian kepengurusan. Pergantian kepengurusan tersebut dilaksanakan pada hari rabu 05 November 2014 yang bertempat di Aula Maesan 1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso yang dihadiri dengan peserta musyawarah sebanyak 61 orang kelompok tani tembakau. Dari hasil musyawarah tersebut terbit sebuah keputusan dan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Petani Tembakau

¹⁹ Wawancara, Moh. Yasid, Bondowoso, 16 Agustus 2018.

²⁰ Erryka Aprilia Putri, *et.al.*, "Analisis Pendapatan dan Efisiensi Biaya Usahatani Tembakau Maesan 2 di Kabupaten Bondowoso", *Jurnal JSEP* Universitas Jember Vol. 8 No. 1 Maret 2015, hlm. 64-65.

²¹ Tanaman tembakau yang pada satu sisi sangat dibutuhkan oleh petani, dan juga sebagai penyumbang devisa yang cukup besar bagi pemerintah. Akan tetapi, pada sisi lain tanaman tembakau juga dinilai dapat memberikan ancaman bagi kesehatan manusia, oleh karenanya tanaman tembakau juga kerap dimusuhi oleh berbagai kebijakan yang dibuat pihak pemerintah. Secara spesifik karya ilmiah yang mengkaji tentang persoalan tersebut yaitu, Kabul Santoso, *Tembakau Dibutuhkan dan Dimusuhi*, (Jember: Jember University Press, 2013).

Indonesia (APTI) Kabupaten Bondowoso yang baru. Dimana berdasarkan musyawarah bapak Muhammad Yasid diputuskan sebagai ketua umum dengan sekretarisnya yaitu bapak Komaruddin, dan bendahara adalah bapak Iriyanto.²² Sejak tahun 2014 Asosiasi Petani Tembakau Indonesia di Kabupaten Bondowoso secara resmi telah berganti kepengurusan. Maka bagaimana peran, langkah, dan aspirasi APTI Bondowoso dalam mendampingi dan melindungi petani tembakau menjadi bagian yang cukup penting bagi perkembangan usahatani tembakau rakyat di Bondowoso.

Berdasarkan pemaparan mengenai peran penting keberadaan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Bondowoso dalam melindungi dan menjembatani aspirasi petani terkait komoditas tembakau menjadi sebuah kajian yang cukup penting. Oleh karenanya penulis tertarik mengangkat kajian penelitian tentang “Eksistensi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Cabang Kabupaten Bondowoso Tahun 2001-2014”. Adapun beberapa alasan penulis tertarik mengangkat kajian tersebut karena penulis melihat akan keringnya kajian yang dengan tema-tema sejenis. Terlebih lagi banyak kajian yang hanya mengupas keberadaan tembakau rakyat saja, namun peran penting dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) masih jauh dari jangkauan kajian tersebut. Maka penulis disini mencoba untuk mengkaji secara lebih jauh mengenai peran penting Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) terhadap eksistensi petani tembakau yang secara spesifik di Kabupaten Bondowoso.

Keberadaan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Bondowoso ini menjadi penting untuk dikaji dikarenakan komoditas tanaman tembakau yang diusahakan oleh rakyat juga tidak kalah luasnya dengan tanaman tembakau yang dikelola oleh negara. Meski pada satu sisi sangat dibutuhkan oleh petani, dan juga sebagai penyumbang devisa yang cukup besar bagi pemerintah. Akan tetapi, pada sisi lain tanaman tembakau juga dinilai dapat memberikan ancaman bagi

²² *Arsip*; Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional No: 076/Kpts-APTINAS/XI/2014 Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Bondowoso.

kesehatan manusia, oleh karenanya tanaman tembakau juga kerap dimusuhi oleh berbagai kebijakan yang dibuat pihak pemerintah.²³

Sementara itu, peran aktif APTI Bondowoso terhadap perkembangan tanaman tembakau milik petani baik dalam rangka membantu petani untuk memperbaiki kualitas mutu tembakau, di sisi lain APTI juga memiliki peran penting sebagai jembatan antara petani dengan industri rokok dalam hal pemasaran hasil panen. Terlebih lagi jika pemerintah mengeluarkan peraturan yang terkesan memojokkan usaha tanaman tembakau, maka peran APTI sendiri menjadi bagian penting sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi petani tembakau. Kendati begitu peran APTI Bondowoso dalam merespon munculnya berbagai peraturan pemerintah mengenai isu pertembakauan tidak dapat dipisahkan begitu saja, bahkan akan menjadi bagian yang sangat penting untuk dikaji sehingga dapat memotret sepanjang sejarah perjalanan petani tembakau di Kabupaten Bondowoso dan berbagai peraturan pemerintah terkait pertembakauan yang selalu berjalan secara beriringan antara kebutuhan dan kepentingan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian tentu memiliki sebuah rumusan masalah yang dijadikan sebuah batas dalam pembahasan suatu penelitian, agar pembahasannya tidak menyimpang dari fokus penelitian. Terlebih lagi dalam penelitian sejarah, dimana skop spasial dan temporal menjadi hal utama dalam merekonstruksi suatu kisah atau peristiwa sejarah. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di ungkap, yaitu:

1. Bagaimana kondisi pertembakauan di Bondowoso sebelum dibentuk APTI?

²³ Secara spesifik karya ilmiah yang mengkaji tentang persoalan tersebut yaitu, Kabul Santoso, *Tembakau Dibutuhkan dan Dimusuhi*, (Jember: Jember University Press, 2013).

2. Langkah apa yang dilakukan APTI untuk petani tembakau di Bondowoso?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan petani tembakau sejak adanya APTI di Bondowoso?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kondisi pertembakauan di Bondowoso sebelum dibentuk APTI.
2. Untuk mengetahui Langkah apa yang dilakukan APTI untuk petani tembakau di Bondowoso.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak nyata yang dirasakan petani tembakau sejak adanya APTI di Bondowoso.

1.3.2 Manfaat

Beberapa manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan adalah ini :

1. Dapat memperkaya dan menambah keragaman dalam pengkajian sejarah indonesia.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam melakukan penelitian sejarah dengan tema-tema yang sejenis.
3. Dapat dijadikan acuan dalam rangka merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pertembakuan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Merekonstruksi peristiwa sejarah membutuhkan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup tersebut, meliputi lingkup spasial (tempat), lingkup temporal (waktu), dan lingkup kajian. Lingkup spasial sebagai menyatakan tempat dimana penulis merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Lingkup temporal sebagai menyatakan akan batasan waktu atau tahun dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Batasan waktu atau tahun menjadi penting, karena berkaitan dengan proses dinamika

sejarah itu sendiri. Dalam lingkup temporal akan dijelaskan tentang alasan-alasan batasan waktu yang ditentukan dalam sebuah penelitian.

Ketiga ruang lingkup tersebut merupakan hak paten dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Lingkup spasial yang ditentukan dalam penelitian ini adalah APTI Cabang Bondowoso. Bondowoso merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra tanaman perkebunan tembakau. Kendatipun daerah Bondowoso memiliki nilai penting dalam sejarah pertembakauan nasional. Akan tetapi, secara spesifik kajian ini lebih mengutamakan peran aktif APTI Bondowoso terhadap perkembangan perusahaan tanaman tembakau oleh petani. Terlebih lagi keberadaan tembakau rakyat Bondowoso juga tidak kalah luasnya dengan perkebunan tembakau yang dikelola oleh negara.

Dengan semakin berkembangnya tembakau rakyat di Kabupaten Bondowoso juga tidak lepas dari peran APTI yang menjadi pelindung dan mitra petani tembakau dalam memperjuangkan nilai ekonomis maupun budaya usahatani tembakau tersebut. Contohnya ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang terkesan memojokkan petani tembakau, maka APTI juga bergerak untuk menolak peraturan tersebut. Bahkan dalam keterkaitan harga pasaran tembakau petani, APTI secara jelas juga berupaya untuk menjadi jembatan antara petani dengan pabrik untuk dapat membeli hasil panen tembakau milik petani di atas harga yang resmi. Maka peran penting APTI yang demikian tersebut menjadi suatu kajian yang memberikan arti penting dalam sejarah pertembakauan yang semakin maju dan modern ini. Maka rekam jejak peran penting APTI dalam memperjuangkan nasib petani tembakau tidak pantas untuk dilupakan begitu saja.

Lingkup temporal atau batasan waktu yang ditentukan dalam penelitian ini mulai dari 2001-2014. Lingkup temporal yang ditentukan berupa kajian sejarah kontemporer. Sejarah kontemporer merupakan kajian sejarah yang mana pelaku sejarahnya masih hidup. Alasan batasan awal waktu yang ditentukan tersebut adalah karena pada tahun 2001 tersebut merupakan awal dari lahirnya Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso (APTB) di Kabupaten Bondowoso. Sejak berdirinya APTB tersebut kemudian memberikan respon positif terhadap

perkembangan dan kinerja masyarakat petani tembakau rakyat di Kabupaten Bondowoso. Sejak lahirnya APTB ini menjadi sebuah jembatan untuk menyampaikan berbagai macam aspirasi masyarakat kepada pemerintah mengenai keluh kesah petani tentang persoalan pertembakauan masyarakat.²⁴ Keberadaan APTB juga memberikan perlindungan kepada petani tembakau untuk tetap menanam tembakau. Walaupun pada sisi lain pihak pemerintah sendiri mengeluarkan berbagai macam aturan, baik mengenai pembatasan luas areal pabrik rokok hingga masuknya rokok impor.²⁵ Sementara itu, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Mereka (petani) sudah terbiasa menanam tanaman pertanian, seperti tembakau sebagai bagian dari tradisi bercocok tanam masyarakat pedesaan. Terlebih lebih bagi daerah yang memiliki nilai historis dengan tembakau, seperti di Kabupaten Bondowoso. Namun, sejak tahun 2013 APTB kemudian diganti menjadi APTI Cabang Bondowoso. Sejak berdirinya APTI tersebut memberikan momentum penting terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau rakyat di Kabupaten Bondowoso. Mengingat bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, makatanaman tembakau perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya.

Sementara tahun 2014 dijadikan batasan akhir penelitian karena pada tahun tersebut struktur kepengurusan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Kabupaten Bodowoso terjadi pergantian. Sehingga pada tahun tersebut dapat dijadikan sebuah momentum dalam perjalanan APTI Bondowoso untuk memperjuangkan nasib petani tembakau berikutnya. Sementara lingkup kajian ini merupakan sejarah sosial dimana peran masyarakat yang tergabung di dalam APTI dan petani tembakau itu sendiri menjadi aktor sosial utama yang penting untuk potret.

Oleh karenanya keterkaitan antara petani tembakau yang tergabung dalam struktur organisasi APTI maupun yang di luar struktur memiliki motivasi dan visi

²⁴ Wawancara dengan Muhammad Yasid, Bondowoso 16 Agustus 2018.

²⁵ Amin Subarkah, *op.cit.*, hlm. 89-94.

yang sama dalam memperjuangkan nilai strategis tanaman tembakau sebagai komoditi andalan bagi petani di Bondowoso. Terlebih lagi mengenai persoalan pertembakaun yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga kesejahteraan masyarakat petani juga banyak tergantung terhadapnya. Maka tidak dapat dipungkiri pula dalam kajian ini nantinya sedikit banyak juga akan menyinggung mengenai persoalan sosial ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mengulas atau meninjau bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansi terhadap pokok materi penelitian.²⁶Tinjaun pustaka mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau relevansi mengenai hasil penelitiannya. Tentu dalam sebuah karya sejarah kita tidak bisa menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru dengan teori-teori yang baru, karena dalam penulisan karya ilmiah apapun kita akan terjebak pada tema-tema penelitian yang memiliki relevansi yang sama, termasuk juga dalam penelitian sejarah. Guna menghindari plagiarisme, maka harus ditunjukkan perbedaan antara karya yang ditinjau itu dengan penelitian yang dilakukan.perbedaan itu yang dapat mempertegas bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan buku atau hasil penelitian terdahulu, sehingga tampak aspek orisinalitasnya.²⁷

Beberapa sarjana yang mengkaji sejarah perkebunan tembakau di antaranya yaitu, pertama Asep Mulyana (Editor) dengan judul buku *Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan*.²⁸Buku ini banyak memberikan gambaran cukup mendalam tentang derita petani tembakau rakyat.Dalam hal ini petani tembakau selalu terjebak dalam situasi yang sulit karena mereka tidak memiliki faktor lingkungan yang melindungi dan memberdayakan petani tembakau.Kehidupan petani tembakau di Indonesia mengalami pasang surut

²⁶ Nurhadi Sasmita, *et.al.*,*Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Yogyakarta: Lembah Manah, 2012), hlm. 23.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Asep Mulyana (Editor), *Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan*, (Jakarta: Leutikaprio, 2015).

dalam mengembangkan budidaya tembakau karena kerap usaha tani tembakau hanya mendatangkan kerugian bagi petani.

Kedua Kabul Santoso dengan judul buku *Tembakau Dibutuhkan dan Dimusuhi*.²⁹ Buku ini secara spesifik menjelaskan bagaimana tanaman tembakau menjadi dibutuhkan dalam analisis ekonomi, dan mengapa tembakau menjadi musuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku ini, bahwasanya Jawa Timur merupakan daerah penghasil tembakau sebesar 70 persen. Buku ini juga menjelaskan bagaimana keberadaan tanaman tembakau selain menjadi sumber devisa yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat, pada sisi lain tembakau juga kerap dijadikan sebagai ancaman. Oleh karena tembakau dibutuhkan dan dimusuhi karena pada satu sisi tembakau telah menjadi tanaman tradisi dan penopang ekonomi masyarakat, namun di sisi lain banyak ditentang dan dianggap mengancam kesehatan manusia. Sebab itulah, pengusahaan tanaman tembakau dapat menimbulkan kontroversi.

Ketiga Suryadi Radjab dengan judul bukunya *Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*.³⁰ Buku ini merupakan kajian tentang tantangan berat yang dihadapi industri rokok kretek yang bisa berdampak pada hilangnya sejumlah hak ekonomi, sosial, dan budaya di beberapa lapisan masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh keberhasilan kampanye global tentang antitembakau dengan diadopsinya World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam sidang majelis kesehatan dunia. Buku banyak mengkaji bagaimana pengendalian tembakau hanya merupakan bentuk tipu muslihat karena pada dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Poin penting dalam kajian buku ini hendak menempatkan kebijakan pemerintah yang mengontrol perdagangan rokok dalam kaitannya dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pengendalian

²⁹ Kabul Santoso, *Tembakau Dibutuhkan dan Dimusuhi*, (Jember: Jember University Press, 2013).

³⁰ Suryadi Radjab, *Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia dan Center For Law and Order Studies, 2013).

produk tembakau tersebut juga dapat memberikan pengaruh terhadap beberapa lapisan masyarakat Indonesia, seperti petani dan industri rokok kecil.

Berdasarkan hasil pemaparan dari beberapa kajian mengenai tanaman tembakau di atas, jelas bahwasanya tidak adanya pembahasan yang lebih mendalam mengenai peran penting asosiasi petani tembakau. Oleh karena, kajian yang akan penulis potret nantinya jauh berbeda dengan dengan kajian yang sudah ada sebelumnya. Dimana penulis disini akan mencoba mengupas tuntas persoalan peran aktif Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) terhadap perkembangan tanaman tembakau rakyat di Kabupaten Bondowoso. Penulis juga akan mengungkapkan bagaimana respon dan peran APTI terhadap munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang terkesan mendiskreditkan para petani tembakau. Kendati demikian kajian yang akan penulis ungkap ini tentu jauh berbeda dengan beberapa karya tulis di atas. Oleh karenanya kajian ini nantinya diharapkan terhindar dari adanya plagiarisme.

1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori

Ilmu sejarah tidak memiliki konsep dan teori, oleh sebab itu dalam melakukan penulisan sejarah dibutuhkan ilmu bantu sosial lainnya sebagai cara menganalisa permasalahan. Untuk mengungkap peristiwa sejarah perlu adanya suatu pendekatan sebagai analisa tingkah laku individu maupun kelompok dalam suatu peristiwa dan suatu konsep teori sebagai alat analisa terhadap sebab-sebab peristiwa sejarah. Kerangka teoretis maupun konseptual itu berarti metodologi di dalam pengkajian sejarah, dan pokok pangkal metodologi adalah pendekatan yang dipergunakan.³¹Selebihnya dalam merekonstruksi masa silam sejarawan selalu berpijak pada sumber atau data sejarah. Dengan didapatkannya data-data sejarah tersebut, tugas sejarawan adalah menarasikan peristiwa masa silam menjadi sebuah kisah (cerita) sejarah.

Guna merekonstruksi suatu peristiwa sejarah harus diterangkan secara lebih jauh dan mendalam sebab-akibatnya. Oleh karena itu dalam suatu

³¹ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Cetakan Pertama (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 32.

rekonstruksi sejarah perlu yang namanya ilmu pendekatan (*approach*). Pengkajian sejarah yang memakai pendekatan akan lebih mampu melakukan eksplanasi (penjelasan) daripada yang membatasi diri pada pengungkapan bagaimana sesuatu terjadi atau menguraikan kejadian sebagai narasi (cerita).³²

Dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi merupakan sebuah studi yang mempelajari cara orang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa dengan perspektif analisis sosiologi.³³ Pendekatan sosiologi ini dapat dijadikan sebagai cara untuk melihat akan kondisi perekonomian masyarakat petani tembakau di Bondowoso. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi diharapkan dalam rekonstruksi ini nantinya mampu mengungkap secara tuntas tentang persoalan-persoalan eksistensi petani tembakau dalam memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya sehari-hari. Dengan adanya pendekatan sosiologi ekonomi diharapkan akan mampu menjelaskan bagaimana antisipasi para petani tembakau di Bondowoso dalam menghadapi situasi pasaran tembakau. Pendekatan sosiologi ekonomi, diharapkan juga agar nantinya penulisan dari riset ini mampu menjelaskan tentang peran penting APTI terhadap eksistensi petani tembakau dalam menjadikan tembakau sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Sementara itu, teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori perubahan sosial yang lebih menitikberatkan mengenai peran sosial. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial atau lembaga sosial.³⁴ Proses perubahan tersebut bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa merupakan terjadi karena dari faktor petani itu sendiri, sementara faktor eksternal bisa dilihat

³² Sindung Hariyanto, *Sosiologi Ekonomi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 18.

³³ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. ix.

³³ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. ix.

³⁴ Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah University Press, 1999), hlm. 186.

dari berbagai campur tangan dari pihak di luar petani, seperti pemerintah dan organisasi sosial lainnya.

1.7 Metode Penelitian

Merekonstruksi suatu peristiwa masa lampau membutuhkan suatu metode. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah dari Louis Gottschalk. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dari peninggalan masa lampau.³⁵ Menurut Louis Gottschalk penulisan sejarah selalu bertumpu pada empat kegiatan pokok, yaitu:

Pertama heuristik atau pengumpulan sumber yang berasal dari jaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan. Sedangkan pengumpulan sumber sejarah sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindra yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon. Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.³⁶ Sumber primer bisa berupa dokumen, laporan, data statistik, media cetak atau koran, majalah, foto, video, dan rekaman yang sezaman dengan penelitian yang dilakukan. Sumber primer tersebut bisa didapat diberbagai instansi, seperti data Dinas Perkebunan Kabupaten Bondowoso, Badan Pusat Statistik Bondowoso, dan koleksi arsip APTI Bondowoso. Sumber sekunder bisa berupa buku yang sudah dipublikasikan yang memiliki relevansi. Sumber sekunder berupa buku dan penelitian bisa didapatkan di Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, dan Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Seorang sejarawan selalu berpijak pada sumber, rekaman, atau dokumen sejarah, karena masa lampau itu sendiri bisa diketahui lewat rekaman atau dokumen yang ditinggalkan sejarah sebagai aktualitas. Sedangkan pengetahuan

³⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Cetakan Kelima (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 32.

³⁶ *Ibid.* hlm. 35.

sejarawan terhadap masa lampau juga dibatasi oleh rekaman atau dokumen sejarah yang terbatas juga. Ada perbedaan dalam sumber sejarah yang lebih menitik beratkan dalam penggunaan data-data sejarah. Seperti sejarah yang bersifat kualitatif datanya berupa deskripsi (berita), peninggalan (bangunan, foto), pikiran, perbuatan, dan perkataan (sejarah lisan), dan sejarah yang bersifat kuantitatif berupa angka-angka (misalnya kejahatan, murid), statistik (misalnya harga sembako, perpajakan), dan sensus (misalnya penduduk, ternak).³⁷

Dalam pengumpulan sumber primer, salah satu cara yang dilakukan penulis adalah melakukan teknik wawancara lisan. Wawancara lisan ini bisa dilakukan terhadap para anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan para petani tembakau di Kabupaten Bondowoso. Sebagai salah satu alternatif penting dalam penelitian ini yaitu dengan cara mewawancarai pelaku sejarah yang masih hidup, terlebih lagi penelitian yang dilakukan berupa kajian komtemporer. Walaupun banyak orang masih skeptis dengan penelitian lisan, akan tetapi metode sejarah lisan sudah dilakukan ribuan tahun lalu oleh sejarawan Herodotus. Sebagaimana yang dikutip dalam buku Helius Sjamsuddin tentang metodologi sejarah, yaitu:

“Penggunaan teknik pengumpulan sumber melalui wawancara lisan sudah banyak dilakukan terutama dalam masalah sejarah sosial, yang berhubungan dengan kehidupan kelas buruh dalam keluarga dan tempat kerja yang jarang diamati atau diteliti secara komtemporer. Di Inggris sejarah lisan didominasi oleh sejarawan-sejarawan sosial yang mempunyai komitmen sosial tertentu sehingga mereka mempunyai jurnal *Oral History*, dan di Indonesia sendiri yaitu Arsip Nasional Jakarta ada seksi khusus sejarah lisan yang menerbitkan secara berkala jurnal / pamflet *Sejarah Lisan*”.³⁸

Kedua kritik sumber atau menyingkirkan bahan-bahan atau bagian-bagian yang tidak otentik. Dari semua sumber-sumber yang didapatkan kita sebagai sejarawan harus menyimpulkan atau mengkritisi semua sumber-sumber yang

³⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi Kedua (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), hlm. 220.

³⁸ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 82-83.

didapatkan. Tidak semua sumber yang didapatkan memiliki kesesuaian dengan objek yang kita teliti. Oleh karena untuk mendekati kebenaran dalam merekonstruksi sejarah sangat diperlukan data-data yang otentik.

Ketiga interpretasi atau menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik. Keempat yaitu historiografi atau penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi sebuah kisah atau penyajian yang berarti. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh disebut historiografi (penulisan sejarah).³⁹ Untuk merekonstruksi peristiwa sejarah harus sesuai dengan teknik penulisan sejarah sehingga menghasilkan karya sejarah yang deskriptif analitis. Untuk mencapai tulisan sejarah yang deskriptif analitis menjadi suatu keharusan dalam sejarah. Tetapi penulisan sejarah ada yang bersifat seperti sejarah naratif. Sejarah naratif ialah menulis secara deskriptif, tetapi bukan sekedar menjejerkan fakta. Ada tiga syarat dalam menulis sejarah naratif yaitu *collogation*, *plot*, dan struktur sejarah.⁴⁰ *Collogation* berarti menulis sejarah itu mencari *inner connection* (hubungan dalam) antar peristiwa sejarah. *Plot* adalah cara mengorganisasikan fakta-fakta menjadi satu kesatuan atau bagian-bagian. *Plot* dalam sejarah mirip dengan sastra yaitu interpretasi dan ekplansi. Sedangkan struktur sejarah diperlukan sebagai rekonstruksi yang akurat.

Dalam empat tahapan metode sejarah tersebut Louis Gottschalk membagi dalam empat konsesus untuk menganalisa sejarah, yaitu pemilihan subyek untuk diselidiki, pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut, pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati-tidaknya, pemetikan unsur yang relevan dan sintesis fakta dalam bentuk kisah (historiografi).⁴¹

³⁹ Louis Gottschalk, *loc.cit.*

⁴⁰ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 147.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 34.

Sebagai pelengkap didalam menyusun tulisan sejarah perlu digunakan hubungan sebab-akibat sehingga akan memenuhi kaidah 5W+1H. Konsep 5W+1H ini mengandung pertanyaan yang harus dijawab dalam merekonstruksi masa lampau, sehingga peristiwa masa lampau tersebut bisa terungkap sebab-akibatnya. Dalam penulisan sejarah, penulis disini mengacu pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*.⁴² Buku tersebut dijadikan sebagai pedoman penulisan dalam menyusun skripsi di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi yang berjudul *Dinamika Perkebunan Tembakau Rakyat Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Tahun 2004-2013*, terdiri dari empat bab yang terdiri dari: Bab 1 pendahuluan yang berisi mengenai, Latar Belakang dan Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup Penelitian, Tinjauan Pustaka, Pendekatan dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 berisi mengenai Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bondowoso Pada Bab 2 ini berisi empat subbab, yakni Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosial Ekonomi, dan Petani Tembakau dan Berdirinya APTI.

Bab 3 Peran dan Pengaruh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Cabang Bondowoso. Pada bab 3 ini berisi empat subbab, Kepengurusan APTI Cabang Bondowoso, Peranan APTI Cabang Bondowoso Terhadap Petani Tembakau, Hadirnya APTI Terhadap Dinamika Tanaman Tembakau Petani, Dampak Adanya APTI Terhadap Petani Tembakau. Kemudian bab 4 adalah Kesimpulan.

⁴² Nurhadi Sasmita, *et.al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Yogyakarta: Lembah Manah, 2012).



BAB 2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 km dari Kota Surabaya. Daerah ini berada di posisi garis $113^{\circ}48' 10''$ -- $113^{\circ} 48'26''$ bujur timur dan $7^{\circ} 50'10''$ -- $7^{\circ} 56' 41''$ lintang selatan.¹ Secara administratif kondisi geografis Kabupaten Bondowoso berbatasan dengan beberapa daerah lainnya, yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bondowoso terdiri dari 33,98 persen hutan, 29,07 persen lahan tegalan, 19,41 persen lahan persawahan, 6,97 persen lahan perkebunan, dan 12,23 persen adalah lahan perkampungan dari luas keseluruhan daerah Bondowoso.² Dengan kondisi geografis yang jauh dari laut, maka secara garis besar Kabupaten Bondowoso termasuk wilayah pedalaman yang identik mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani.

¹ BPS, *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2000*, (Bondowoso: BPS, 2000), hlm, xviii.

² *Ibid.*

Kabupaten Bondowoso memiliki potensi yang cocok sebagai wahana lahan pertanian, baik pertanian pangan maupun perkebunan. Hal demikian dapat didukung oleh kondisi wilayah Bondowoso yang memiliki daerah pegunungan seperti, gunung ijen yang berada terletak di bagian timur, dan gunung argopuro yang terletak di sebelah barat wilayah Bondowoso dengan kondisi curah hujan rata-rata 5,708 mm per-tahun, selama hari rata-rata 97 hari, dengan temperatur 26 derajat celcius. Dengan demikian daerah Bondowoso juga tergolong sebagai daerah yang sering terjadi hujan, sehingga daerah ini tergolong sebagai daerah yang subur dan berpotensi untuk lahan pertanian.³

Eksistensi dan perkembangan kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Bondowoso juga didukung dengan adanya faktor alam yang memadai. Seperti adanya 5 sungai, di antaranya sungai sampeyan baru 64 km, sungai mrawan 32 km, sungai deluang 30 km, sungai mayang 56 km, dan sungai bedadung 70 km yang tentu menjadi faktor utama tersedianya air irigasi untuk lahan-lahan pertanian seperti tanaman tembakau, padi, dan jagung yang ditanam di lahan persawahan.⁴

Secara geografis kondisi daerah Bondowoso terbagi menjadi dua bagian yaitu, (1) dataran tinggi pegunungan yang berpotensi sebagai tempat tanaman perkebunan keras, seperti kopi, karet, dan kakao, (2) dataran rendah yang berpotensi sebagai tempat tanaman pertanian pangan, seperti jagung, padi, kacang, dan tanaman perkebunan seperti tembakau dan tebu. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1.560,10 km yang terbagi menjadi 17 kecamatan dengan 185 desa dan 10 kelurahan yang menyebar di wilayah Kabupaten Bondowoso. Di bawah berikut adalah tabel mengenai luas wilayah Kabupaten Bondowoso.

³ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 2000

	Kecamatan <i>Sub Regency</i>	Luas Wilayah <i>Area (Km²)</i>	Jumlah Desa <i>Number of Villages</i>
	(1)	(2)	(3)
1.	Maesan	6.425,00	11
2.	Grujugan	4.064,00	13
3.	Tamanan	4.895,00	13
4.	Pujer	3.953,00	11
5.	Tlogosari	9.131,00	9
6.	Sukosari	17.649,00	9
7.	Tapen	4.860,00	9
8.	Wonosari	3.501,00	11
9.	Tenggarang	2.322,00	11
10.	Bondowoso	2.142,00	11
11.	Curahdami	7.035,00	19
12.	Wringin	5.801,00	13
13.	Pakem	7.266,00	8
14.	Tegalampel	8.720,00	13
15.	Klabang	39.910,00	17
16.	Prajejan	10.800,00	8
17.	Cermee	17.536,00	9
	Jumlah /Total	156.010,00	195

Sumber: BPS, *Kabupaten Boondowoso Dalam Angka 2000*, hlm. 9.

Berdasarkan data tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwasanya dari 17 kecamatan luas wilayah yang paling tinggi yaitu di Kecamatan Klabang dengan luas mencapai 39,910,00 km² dengan jumlah 17 desa. Sementara Kecamatan Bondowoso merupakan wilayah paling sempit karena hanya memiliki keluasan 2,142,00 km² dengan jumlah 11 desa. Dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bondowoso tentu juga terjadi pembagian penggunaan tanah yang berbeda. Sebagaimana di Kabupaten Bondowoso luas lahan pekarangan mencapai 19,083,00 km², tegalan 45,348,12 km², perkebunan 10,5617,38 km², kebun campur 360,50 km², alang-alang 4,231,00 km², persawahan 30,285,25 km², kehutanan 53,020,43 km², tanah tandus 1,058,00 km², dan tanah rusak 2,599,40 km². Sebagaimana untuk penggunaan tanah tegalan paling luas di Kecamatan Klabang yang mencapai 8,171,21 km², sementara untuk penggunaan tanah

persawahan paling luas di Kecamatan Sukosari yang menacapai 2,614,60 km². Akan tetapi secara keseluruhan penggunaan tanah paling luas adalah sebagai lahan kehutanan yang mencapai 12,505,80 km² di Kecamatan Klabang.⁵

Di Kabupaten Bondowoso untuk tanaman pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan secara umum banyak ditanam pada lahan-lahan persawahan. Hal ini dikarenakan geografis daerah Bondowoso juga memiliki luas areal sawah yang cukup luas setelah lahan hutan. Akan tetapi untuk kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani lebih banyak di areal sawah. Mereka para petani di Bondowoso umumnya menanam tanaman, padi, jagung, ubi, tembakau, dan palawija. Dengan kata lain Kabupaten Bondowoso dapat dikategorikan sebagai daerah yang menganut tipe agraris.⁶

Berdasarkan kondisi geografis, khususnya untuk lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bondowoso area persawahannya terbagi menjadi tiga jenis pengairan, seperti areal persawahan dengan jenis pengairan teknis, setengah teknis, dan sederhana. Secara tidak langsung kondisi jenis pengairan sawah tersebut juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap produktivitas hasil panen dari petani yang juga berakibat terhadap banyak tidaknya pendapatan yang diperoleh para petani. Terlebih lagi untuk tanaman padi, jagung, dan tembakau yang juga banyak membutuhkan air pada saat proses pertumbuhannya. Di bawah berikut adalah tabel mengenai luas lahan sawah di Kabupaten Bondowoso menurut jenis pengairannya.

⁵ BPS, *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2002*, (Bondowoso: BPS, 2002), hlm, 81-82.

⁶ *Ibid.*, hlm. xix-xxi.

Tabel 2.2
Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2000

Kecamatan <i>Sub Regency</i>	Luas Lahan Sawah (Ha) <i>Rice Field Area (Ha)</i>			Jumlah Total
	Teknis <i>Technical</i>	Setengah Teknis <i>Semi Technical</i>	Sederhana <i>Non Technical</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Maesan	1.078	353	37	1.468
2. Grujugan	1.508	166	57	1.731
3. Tamanan	2.091	190	53	2.334
4. Pujer	2.414	142	42	2.598
5. Tlogosari	1.587	90	625	2.302
6. Sukosari	2.009	385	316	2.710
7. Tapen	2.018	27	31	2.076
8. Wonosari	2.128	255	318	2.701
9. Tenggarang	1.666	179	0	1.845
10. Bondowoso	1.164	18	3	1.185
11. Curahdami	1.093	438	221	1.752
12. Wringin	492	71	48	611
13. Pakem	445	311	184	940
14. Tegalampel	1.257	20	7	1.284
15. Klabang	1.469	38	100	1.607
16. Prajekan	1.039	0	353	1.392
17. Cermee	2.118	0	72	2.190
Jumlah/Total	25.576	2.683	2.467	30.726

Sumber: BPS, *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2000*, hlm. 83.

Berdasarkan tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa, areal sawah dengan jenis pengairan teknis adalah yang paling luas dengan mencapai 25,576 hektar, sementara untuk sawah jenis pengairan setengah teknis seluas 2.683 hektar, dan jenis pengeiran non-teknis hanya seluas 2,467 hektar saja. Akan tetapi dari luas keseluruhan areal sawah yang ada di Kabupaten Bondowoso mencapai 30.726 hektar.⁷ Dengan luasnya lahan sawah tersebut tentu dapat mencerminkan potret masyarakat agraris di daerah Bondowoso karena sebagian besar masyarakatnya adalah petani, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada hasil panen dari pertaniannya.

⁷ BPS 2000, *Op.cit.*, hlm. 81-84.

Tersedianya lahan sawah yang memadai dengan kondisi jenis pengairan yang cukup bagus, maka kondisi tersebut juga menjadi bagian penting dari hasil panen petani. Terbukti bahwa hasil produksi padi di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 1999 hasil produksi padi mencapai 287,874 ton, sementara pada tahun 2000 mencapai 291,173 ton. Berdasarkan hasil data tersebut hasil produksi padi dari tahun 1999-2000 terjadi kenaikan sebesar 1,13 persen. Begitupula dengan hasil produksi tanaman jagung kenaikan dari 3,04 ton per-hektar di tahun 1999 menjadi 3,06 ton per-hektar di tahun 2000. Berbeda dengan tanaman perkebunan seperti tembakau dan kelapa yang mengalami penurunan, sementara yang mengalami kenaikan produksi adalah kopi, kapuk, pinang, dan cengkeh.⁸ Berdasarkan hasil produktivitas dari tanaman pertanian yang mengalami perkembangan tersebut dapat membuktikan bahwa tanaman pertanian di daerah Bondowoso memberikan potensi yang cukup penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2 Kondisi Demografis

Dalam konteks demografis, masyarakat secara umum merupakan sebuah komponen utama dalam kehidupan yang berlangsung. Sebab dengan adanya masyarakat akan terjadi sebuah interaksi dalam proses kehidupan dan akan melahirkan suatu sintesa budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu antara masyarakat dan budaya saling memiliki keterikatan yang kuat sebagai identitas kelompok. Dimana antara budaya dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena sejarah dan ekologi masyarakat memiliki peranan besar dalam pembentukan budaya.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. xvii-xxi.

⁹ Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, lukisan, nyanyian, musik, dan kepercayaan yang kesemuanya itu mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakat itu sendiri. Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Edisi Paripurna, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. xi.

Salah satu ciri utama unsur budaya dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari ragam bahasa yang digunakan. Di Kabupaten Bondowoso sebagian besar penduduknya berasal dari suku Madura, sehingga budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat kebanyakan adalah budaya Madura, dan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari oleh masyarakat adalah bahasa Madura. Hal tersebut dapat mencerminkan sistem sosial masyarakat pedesaan dari Madura. Sistem sosial merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara sistem budaya dan masyarakat setempat. Sebab itu antara sistem sosial dan sistem budaya merupakan rangkain yang bersifat simultan. Nilai budaya masyarakat merupakan pedoman dari pola hidup masyarakat yang terwujud berupa aturan, norma, larangan dan nilai-nilai yang merupakan warisan secara turun-temurun masih berlaku.¹⁰

Secara historis terbentuknya budaya dan masyarakat Madura di Kabupaten Bondowoso disebabkan karena adanya beberapa faktor penting yang mempengaruhinya, salah satu faktor tersebut adalah dengan adanya arus migrasi orang-orang Madura ke daerah Bondowoso di era kolonialisme Belanda. Seiring dengan adanya migrasi orang-orang Madura tersebut menyebabkan daerah Bondowoso semakin berkembang, ramai, dan menjadi salah satu daerah penghasil tanaman perkebunan, seperti tebu, tembakau, kopi, kakao, dan juga tanaman pertanian seperti padi, dan jagung yang menjadi identitas penting sebagai masyarakat agraris.¹¹

Kondisi demografis atau kependudukan di Kabupaten Bondowoso tergolong sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi di daerah Jawa Timur. Bahkan sejak tahun 1996-2000 kondisi

¹⁰ Sistem masyarakat meliputi aktivitas manusia yang berinteraksi satu sama lainnya dari waktu ke waktu dengan pola dan atas dasar tata kelakuan tertentu. Lihat pada Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1974), hlm. 23-37.

¹¹ Arus migrasi orang-orang Madura ke daerah Situbondo melalui pelabuhan Panarukan. Sementara penyebab terjadinya migrasi orang-orang Madura ke daerah Bondowoso karena adanya kepentingan mencari pekerjaan di perkebunan gula, tembakau dan juga perkebunan kopi milik Belanda. Lihat Tri Chandra Aprianto, *Dekolonisasi Perkebunan di Jember Tahun 1930an-1960an*, *Tesis Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia*, 2011. hlm. 39.

kependudukan di Kabupaten Bondowoso selalu mengalami perkembangan. Di bawah berikut adalah tabel mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Bondowoso.

Tabel 2.3
Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Bondowoso Tahun 1996-2000

Kcamatan Sub Regency	Luas Area (Km ²)	Kepadatan Penduduk <i>Populaion Density</i>				
		1996	1997	1998	1999	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maesan	64,25	639,70	639,67	639,58	645,77	652,34
Grujugan	40,64	867,57	866,46	868,01	869,64	889,62
Tamanan	48,95	1.028,99	1.030,07	1.031,58	1.035,34	1.041,49
Pujer	39,53	977,74	978,29	977,84	977,71	977,54
Tlogosari	91,31	432,94	435,42	437,12	437,17	438,04
Sukosari	176,49	245,25	245,66	245,49	245,83	246,35
Tapen	48,60	646,50	646,63	647,82	650,12	653,46
Wonosari	35,01	987,55	985,46	982,12	982,32	982,43
Tenggarang	23,22	1.411,24	1.411,28	1.414,64	1.418,00	1.421,27
Bondowoso	21,42	3.060,32	3.058,40	3.055,32	3.052,52	3.086,74
Curahdami	70,35	599,83	600,64	601,36	600,67	601,65
Wringin	58,01	619,50	618,24	617,03	618,17	351,30
Pakem	72,66	272,52	272,87	273,89	276,88	493,63
Tegalampel	87,20	404,19	404,56	404,94	405,44	405,89
Klabang	399,10	112,60	112,69	112,59	112,78	112,81
Prajeakan	108,00	299,54	298,79	297,79	297,09	297,05
Cermee	175,36	217,64	216,98	216,41	216,75	217,68
Jumlah/ <i>Total</i>	1.560,10	422,01	423,78	423,85	424,63	426,69

Sumber: BPS, *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2000*, hlm. 19.

Berdasarkan tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan, bahwasanya kondisi demografis atau kependudukan di Kabupaten Bondowoso dari tahun 1996 dengan jumlah penduduk mencapai 422,01 orang, kemudian di 2000 mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk mencapai 426,69 orang. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2000, penduduk kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan 1,69 persen.¹² Adapun, dalam masalah kependudukan hal

¹² BPS 2000, *Op.cit.*, hlm. xviii.

yang perlu diperhatikan adalah jumlah penduduk dalam suatu tempat tertentu tidak selalu mengalami stagnasi oleh karena keberadaan jumlah penduduk itu sendiri sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti perpindahan penduduk, kelahiran, dan kematian. Dengan demikian dalam beberapa kurun waktu tertentu jumlah penduduk suatu daerah selalu mengalami perubahan yang tidak menentu.

Mengingat kondisi kependudukan suatu daerah selalu dinamis, maka kasus di Kabupaten Bondowoso juga terjadi perubahan masalah demografi. Pada tahun 2002 di Kabupaten Bondowoso terjadi pemekaran yang sebelumnya terbagi 17 kecamatan kemudian bertambah menjadi 20 kecamatan, yaitu adanya Kecamatan Binakal, Pakem, dan Sempol. Akibatnya jumlah desa di daerah Kabupaten Bondowoso terjadi peningkatan, yang awalnya hanya 185 desa dan 10 kelurahan kemudian menjadi 195 desa dan 10 kelurahan. Kendatipun sejak tahun 2002 di Bondowoso terjadi pemekaran desa sebanyak 10 desa.¹³ Sejak adanya pemekaran desa di tahun 2002, hal itu juga menandakan bahwasanya penduduk di Kabupaten Bondowoso juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2002 jumlah penduduk Bondowoso mencapai 689,923 jiwa. Dibanding dengan tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan 0,23 persendi antara 20 kecamatan yang ada.¹⁴

Berbicara soal kondisi demografi, maka seluruh unsur mengenai kependudukan yang ada di Kabupaten Bondowoso menjadi penting untuk dikaji. Terkait juga mengenai persoalan ketenagakerjaan. dalam hal ini, masalah ketenagakerjaan tidak lepas dari pencari kerja, permintaan, dan penempatan tenaga kerja. Pada tahun 2002 jumlah pencari kerja di Kabupaten Bondowoso mencapai 1.536 jiwa. Sementara itu, jumlah lowongan kerja hanya 791 jiwa. Hal yang demikian tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia dengan rasio perbandingan 1 : 2,

¹³ BPS 2002, *Op.cit.*, hlm. 27-28.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

yang berarti dalam satu lowongan kerja diperebutkan oleh dua orang pencari kerja.¹⁵

Dari segi pendidikan, di Kabupaten Bondowoso bila dibandingkan antara tahun 2001/2002 potensi jumlah murid sekolah dasar mengalami kenaikan 3,46 persen pada tahun 2002/2003. Sementara untuk sekolah lanjutan pertama mengalami kenaikan 5,5 persen, dan sekolah lanjutan umum mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 40,32 persen.¹⁶ Begitupula dengan pendidikan non Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang notabeneanya adalah pendidikan pesantren juga tidak kalah saing mengenai potensi peningkatan jumlah murid yang ada. Secara keseluruhan jumlah Pondok Pesantren di Bondowoso sebanyak 130 Pondok Pesantren dengan jumlah santri sebanyak 23,701 jiwa pada tahun ajaran 2002/2003. Terbukti untuk tingkat sekolah MI jumlah murid mengalami peningkatan sebesar 3,78 persen, untuk jenjang MTs mengalami kenaikan 9,27 persen, dan untuk MA juga mengalami kenaikan sebesar 26,12 persen.¹⁷

Mengenai persoalan demografis di Kabupaten Bondowoso, tentu juga tidak bisa lepas dari adanya potensi sumberdaya manusia yang dapat dilihat dari unsur pendidikan masyarakat. Mengingat Kabupaten Bondowoso adalah daerah pedalaman dengan corak masyarakat agraris, maka tidak menutup kemungkinan tingkat pendidikan masyarakat di Bondowoso tergolong cukup rendah bila dibandingkan dengan daerah yang lebih maju seperti, Jember, Pasuruan, Surabaya, dan Sidoarjo yang merupakan kota besar yang ada di wilayah Jawa Timur dengan tingkat dan sistem pendidikannya yang jauh lebih maju.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm.61-64.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Secara umum di dalam kehidupan masyarakat pedesaan terdapat status sosial yang masih melekat. Status sosial tersebut berupa pembagian struktur sosial masyarakat. Di wilayah masyarakat petani di Kabupaten Bondowoso dapat digolongkan ke dalam tiga struktur kelas sosial, yaitu golongan masyarakat kelas atas, masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas bawah. Lapisan tersebut membentuk piramida, biasanya lapisan kelas bawah tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan kelas sosial yang lainnya.¹⁸ Kondisi sosial masyarakat di Bondowoso mempunyai ciri seperti masyarakat tradisional pada umumnya yang tergolong dalam tiga bentuk masyarakat, yaitu masyarakat kaya, sedang dan miskin. Pola pembagian kelas dalam masyarakat pedesaan biasanya diukur dari luas kepemilikan tanah yang dimilikinya. Bahkan kepemilikan atas tanah bagi masyarakat pedesaan merupakan satu-satunya sumber pendapatan.¹⁹

Adapun fungsi kepemilikan tanah bagi masyarakat petani juga memegang peranan penting sebagai modal, nilai modal tanah adalah sebagai modal tetap. Tanah memiliki peranan yang sangat penting karena kepemilikan tanah merupakan suatu proses terbentuknya suatu stratifikasi bagi masyarakat agraris. Masyarakat yang memiliki tanah luas secara otomatis menduduki lapisan atas, sementara yang tidak memiliki tanah sama sekali akan menduduki lapisan paling bawah.²⁰ Pada umumnya masyarakat yang tidak memiliki tanah adalah mereka para buruh tani. Buruh tani hanya memperoleh penghasilan terutama dari bekerja yang mengambil upah untuk para pemilik tanah atau para penyewa tanah. Para buruh tani selalu berada pada lapisan sosial masyarakat yang paling bawah,

¹⁸ Lapisan dalam masyarakat, serta banyaknya jumlah lapisan tergantung dari penyelidik yang meneliti suatu masyarakat tertentu, penyelidik mana mempunyai dasar-dasar serta titik tolak masing-masing. Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: UI Press, 1970), hlm. 155.

¹⁹ Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, (penyunting), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 5.

²⁰ Lihat Gerard Juliaan Vink, *Dasar Dasar Usaha Tani di Indonesia*, terj. Ny. Sahertian, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 137-142.

biasanya dalam keadaan yang amat miskin dan merupakan kelompok yang paling banyak berpindah dalam masyarakat desa.²¹

Di Kabupaten Bondowoso kondisi penduduknya lebih banyak didominasi oleh masyarakat petani. Kendati begitu dominasi pekerjaan masyarakat di Bondowoso adalah sebagai petani. Akan tetapi kesemuanya itu juga didukung oleh kondisi geografis Bondowoso yang berada di daerah pedalam dengan kondisi cuaca hujan yang memadai yang cocok sebagai daerah agraris. Oleh karena itu profesi masyarakat Bondowoso yang menjadi petani masih mendominasi dengan jumlah mencapai 163.493 orang. Adapun selain masyarakatnya sebagai petani, di sisi lain masyarakat di Kabupaten Bondowoso juga sebagai buruh tani dengan jumlah 141,766 , pedagang 37,609, pegawai negeri sipil 13,265, karyawan swasta 9,720. Sebagian besar jumlah petani paling tinggi yaitu terdapat di Kecamatan Tamanan dengan jumlah 18.672, sementara yang paling sedikit di Kecamatan Curahdami sekitar 1,491 orang. Selain jumlah petani mendonimasinya, akan tetapi keberadaan masyarakat yang profesinya sebagai buruh tani juga penting keberadaannya. Hal itu dikarenakan hubungan antara petani dengan buruh tani saling simbiosis mutualisme / ketergantungan. Di Kabupaten Bondowoso jumlah buruh tani paling banyak terdapat di Kecamatan Wringin dengan jumlah 14,362 orang, sementara jumlah buruh tani paling sedikit yaitu Kecamatan Pakem dengan jumlah 1,198 orang.²²

Di Kabupaten Bondowoso secara umum masyarakat memanfaatkan lahan pertaniannya khususnya areal sawah untuk dijadikan tempat menanam tanaman pangan, seperti padi, jagung, ubi, syuran, dan tanaman perkebunan seperti tebu dan tembakau. Pada musim kemarau merupakan musim yang dapat meberikan potensi pendapatan yang penting bagi petani. Dimana pada musim kemarau bisanya masyarakat petani di Bondowoso menanam tembakau. Kendatipun tembakau merupakan salah satu tanaman andalan bagi masyarakat sebagai sumber devisi perekonomian keluarga. Meski harga jual dari tembakau masih sangat

²¹ Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, *Sosisologi Pedesaan*, Cetakan Sebelas (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 113.

²² BPS 2000, *Op.cit.*, hlm. 25-26.

bergantung pada pabrikan. Namun optimisme masyarakat petani tembakau di Bondowoso masih sangat bagus. Oleh karena itu, bagi secara umum tanaman tembakau masih menjadi tanaman andalan bagi masyarakat.²³

Aktivitas pertanian masyarakat di Kabupaten Bondowoso juga tidak hanya sebatas pada penanaman tembakau di musim kemarau saja. Pada musim penghujan masyarakat petani juga mulai menanam tanaman pertanian pagangn, seperti jagung, padi, ubi, sayuran, cabe dan lain-lain sesuai keinginan dan potensi harga jual yang cukup untuk menopang perekonomian masyarakat. Tentunya untuk mendapatkan harga jual yang bagus para petani juga harus meningkatkan kualitas hasil produktivitas pertaniannya. Untuk mempermudah dalam meningkatkan kualitas pertanian, maka dibutuhkan sebuah organisasi tani. Keberadaan organisasi tani ini menjadi penting karena masyarakat juga membutuhkan peran aktif pemerintah dengan cara adanya sosialisasi masalah pertanian.

Oleh sebab itu untuk mempermudah terjadinya sosialisasi pertanian maka dibutuhkan kelompok tani. Di Kapaten Bondowoso, khususnya mengenai jumlah kelompok tani perkebunan rakyat terdapat 7 kelompok tani, yaitu kelompok tani perkebunan kelapa terdapat 48 dengan jumlah anggota 2,454 orang. Untuk kelompok tani tanaman kopi terdapat 29 dengan jumlah anggota 741 orang, kelompok tani tanaman jambu mete sebanyak 10 kelompok dengan jumlah anggota 487 orang, tanamam pinang sebanyak 1 kelompok dengan jumlah anggota 22 orang, tanaman tebu sebanyak 31 kelompok dengan jumlah anggota 540 orang, tanaman obat sebanyak 1 kelompok dengan jumlah anggota 18 orang, dan paling banyak yaitu pada tanaman tembakau sebanyak 101 kelompok dengan jumlah anggota 3,759 orang.²⁴

Berbicara mengenai sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bondowoso merupakan sebuah pembahsan yang luas dan menartik. Selain banyak membahas masalah proveksi masyartakat yang berkaitan persoalan status sosial ekonomi,

²³ Wawancara dengan Moh. Yasid, Bondowoso 16 Agustus 2018.

²⁴ BPS 2000, *Op.cit.*, hlm. 125.

maka tidak kalah pentingnya untuk membahas persoalan kehidupan sosial masyarakat Bondowoso terkait sosial agama. Sebagai masyarakat yang dominasinya adalah masyarakat Madura, maka kehidupan status sosial agama menjadi sebuah identitas yang penting. Terlebih lagi daerah Bondowoso juga didominasi oleh dunia pesantren, sebagaimana menjadi ciri khas dari masyarakat pedesaan. Di bawah berikut adalah tabel mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama.

2.4 Petani Tembakau dan Berdirinya APTI

Berbicara mengenai sejarah perkebunan tembakau di Indonesia menjadi sebuah studi yang tidak pernah ada habisnya. Oleh karena itu keberadaan perkebunan menjadi salah satu unsur penting di Indonesia. Perkebunan tembakau yang berkembang pesat dan menjadi andalan komoditas tanaman ekspor adalah tembakau cerutu. Pengusahaan tembakau tersebut paling besar di Deli Sumatera, Klaten Jawa Tengah, dan di daerah Karesidenan Besuki.

Salah satu tempat perkebunan tembakau di Karesidenan Besuki adalah Bondowoso. Dalam rangka menginvestasikan modalnya, para pengusaha Belanda mulai memperluas usahanya di Kabupaten Bondowoso dengan caramengajukan hak sewa (*opstal*) di berbagai distrik afdeling Bondowoso. Pertama, C.H. Doup dan J.G. Berkholtst pengusaha tembakau asal Belanda yang sejak tahun 1850-an telah menyewa tanah-tanah penduduk. Pengajuan hak sewa dari tuan C.H. Doup dan J.G. Berkholtst pada tahun 1860 kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan ijin atas hak sewa tanah seluas 30 bau di wilayah distrik Bondowoso. Kedua, Fransen van de Putte bekerjasama dengan van Th. AN Lorenty membuka perusahaan perkebunan tembakau sejak tahun 1850-an di afdeling Bondowoso, tepatnya di daerah Bondowoso bagian utara yaitu Sukowono. Melihat usaha tanaman tembaka semakin berkembang pada tahun 1856 Fransen van de Putte juga mengajukan hak sewa di daerah Penanggungan seluas 60 bau. Ketiga, pada tahun 1853 D.J. Uhlenbeck pengusaha tembakau *Na Oogst* afdeling Bondowoso di daerah Djelbuk yang menjadi bagian dari daerah Maesan dengan luas lahan sewa mencapai 106 bau. Untuk memperlancar usaha perkebunan tembakau, pihak

pengusaha perkebunan Belanda membutuhkan tenaga kerja yang memadai. Salah satu tenaga kerja perkebunan tembakau untuk daerah Besuki umumnya didatangkan dari Pulau Madura.²⁵

Tanaman tembakau dalam perkembangannya semakin mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya perusahaan tanaman tembakau rakyat yang dipandang memiliki potensi ekonomi yang besar. Dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditi tembakau rakyat pihak pemerintah juga ikut terlibat langsung. Tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan cara membentuk PMU (Proyek Manajemen Unit) berbasis komoditi pada tahun 1976/1977. Selanjutnya PMU tembakau berkembang di daerah sentra perkebunan tembakau, seperti daerah Kabupaten Bondowoso, Bojonegoro, Lumajang, Probolinggo, Pamekasan, dan Sumenep. Kebijakan dan peran aktif organisasi pemerintah yang demikian kemudian merespon perkembangan perkebunan tembakau rakyat.²⁶ Begitupula hasil dari semua komoditas perkebunan tanaman tembakau yang ada di daerah Bondowoso memiliki peranan penting yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Sebagian besar perusahaan tanaman tembakau di Bondowoso dilakukan oleh petani, baik tembakau jenis *Voor Oogst* maupun tembakau *Na Oogst*.²⁷

Turut campur pemerintah dalam perusahaan tanaman tembakau milik petani semakin menemukan bentuknya manakala terbentuk organisasi tani yaitu Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Khususnya di wilayah Jawa Timur APTI didirikan pada tahun 2000 di Surabaya. Adapun latar belakang berdirinya APTI karena adanya keresahan para petani tembakau pada saat musim tanam dan panen tembakau. Ketika musim panen tembakau tiba para petani selalu mengalami kesulitan untuk menjual hasil panennya. Lemahnya posisi tawar pada

²⁵ Tri Chandra Aprianto, "Dekolonisasi Perkebunan di Jember Tahun 1930an-1960an" *Tesis* Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011, hlm. 43.

²⁶ Moch. Samsul Arifien, *Tembakau di Persimpangan Jalan*, (Surabaya: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2013), hlm. 6.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

pabrikasi besar membuat jual tembakau milik petani tertekan manakala musim panen tiba. Untuk itulah dirasa perlu adanya asosiasi yang bisa mendampingi petani, menjadi pelindung dan mitra. Alasan lain berdirinya APTI juga disebabkan semakin merosotnya jumlah areal tembakau di Jawa Timur. Sehingga dengan berdirinya APTI diharapkan mampu mendorong semangat petani untuk menanam tanaman tembakau nantinya.²⁸

Ketika pemerintah secara langsung turut ikut campur dan memberikan peran penting dalam pengusahaan tanaman tembakau terhadap petani, akibatnya secara lambat laun tanaman tembakau di Bondowoso semakin mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada dasarnya tanaman tembakau juga mempunyai sifat yang sangat khusus seperti tanaman ekspor yang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanaman tembakau rakyat yang ada di Indonesia sangat memiliki kontribusi penting dalam penyumbang devisa Negara karena tanaman tembakau rakyat memiliki areal yang tidak kalah luasnya dengan perkebunan tembakau milik pemerintah, begitu pula dalam hasil produksinya. Sementara itu, di daerah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2000 tanaman tembakau rakyat mencapai luas 7.663 hektar.²⁹

Sejak berdirinya APTI di Jawa Timur hal ini kemudian memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan tanaman tembakau rakyat. Seperti halnya eksistensi tanaman tembakau rakyat di Kabupaten Bondowoso yang semakin berkembang. Perkembangan tembakau rakyat di Bondowoso kemudian memberikan respon positif kepada para petani untuk membentuk sebuah organisasi tani yang berbasis komoditi tembakau. Dalam rangka untuk meninjau dan mendampingi perkembangan tanaman tembakau rakyat, maka pada tahun 2001 perwakilan petani tembakau di Kabupaten Bondowoso secara mufakat telah mendirikan sebuah perkumpulan petani tembakau. Tepatnya pada hari rabu 23

²⁸ Amin Subarkah, "APTI Jatim Siap di Barisan Terdepan", dalam Moch. Samsul Arifin, *ibid.*, hlm. 89-90.

²⁹ Moch. Samsul Arifin, "Mekanisasi Pengolahan Tanah dan Pasca Panen Tembakau Rajangan Jawa", *Majalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur*, Surabaya 2013, hlm. iv.

Mei 2001 terbentuklah Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso (APTB). Pada awal berdirinya APTB pertamakali diketuai oleh bapak KH. Halid, dengan wakil ketua 1 H. Faisal, dengan jumlah anggota kesuluruhan sebanyak 32 orang.³⁰ Pada masa bapak KH. Halid menjabat sebagai ketua APTB ia juga sebagai Sekretaris Desa Tenggarang. Dengan memiliki jabatan yang demikian memberikan kemudahan dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat petani tembakau karena KH. Halid termasuk salah satu tokoh masyarakat yang tentu dipercaya oleh masyarakat sekitar. Sehingga ketika ia menjabat sebagai ketua APTB juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap eksistensi pertanian tembakau di Kabupaten Bondowoso.³¹

Hal lain yang tidak bisa kita lupakan begitu saja adalah bahwasanya sejak berdirinya APTB maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan tanaman tembakau rakyat. Sebagaimana perannya untuk melindungi petani, maka sejak berdiri Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) juga mengemban tugas penting terhadap petani. Adapun salah satu tugasnya yakni, APTI memiliki peran untuk menjembatani petani dengan pemerintah dalam hal bantuan terkait komoditi tanaman tembakau, seperti penyuluhan program intensifikasi mutu tembakau. Disini APTI juga berfungsi sebagai jembatan pasar, dalam artian bagaimana industri rokok dapat membeli tembakau milik petani di atas harga resmi.

Pada dasarnya tanaman tembakau juga mempunyai sifat yang sangat khusus seperti tanaman ekspor yang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanamantembakau rakyat yang ada di Indonesia sangat memiliki kontribusi penting dalam penyumbang devisa Negara karena tanaman tembakau rakyat memiliki areal yang tidak kalah luasnya dengan perkebunan tembakau milik pemerintah, begitu pula dalam hasil produksinya. Di bawah berikut adalah tabel mengenai hasil produktivias tanaman perkebunan di Kabupaten Bondowoso.

³⁰ Surat Keterangan (SK) Kesepakatan Petani Tembakau Bondowoso, pada hari rabu 23 mei 2001 di Bondowoso, hlm. 1-3.

³¹ Wawancara dengan KH. Halid, Bondowoso 25 februari 2019.

Tabel 2.5

Hasil Produksi Tanaman Tembakau di Kaputen Bondowoso Tahun 2000

Jenis Tanaman <i>Crope</i>	Luas <i>/Planted Area(Ha)</i>	Produksi/ <i>Production (Ton)</i>	Produktifias <i>Productivity (Kg/Ha)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tembakau			
- Virginia	938,70	1.317,96	1.404
- Kasturi	874,50	653,25	747
- Rajangan	3.958,00	3.168,67	801
- Na Ocgst	37,67	38,17	1.013
- Berly	18,90	28,35	1.500

Sumber : BPS, *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2000*, hlm. 107.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan mengenai hasil produktivitas tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2001. Tidak dapat kita pungkiri lagi, bahwasanya potensi dari tanaman perkebunan khususnya tembakau rakyat sangat tinggi. Dari potensi tanaman tembakau rakyat, luas lahan dan hasil produksi tembakau rajangan mendapati posisi puncak dengan luas mencapai 3,958,00 hektar dengan produksi mencapai 3.168,67 ton dengan rasio per-hektar lahan dapat memproduksi tembakau sebanyak 801 kilogram. Hal ini dapat memberikan gambaran akan pentingnya keberadaan dan eksistensi tembakau rakyat sebagai sumber devisa bagi masyarakat maupun negara.

Perkembangan tanaman tembakau yang kian meningkat di daerah Bondowoso, tentu juga tidak lepas dari adanya dukungan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pernah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Kebijakan tersebut membrikan kebebasan bagi petani untuk menenam tanaman komoditi sesuai keinginannya. Tentu tanaman tembakau menjadi pilihan di kalangan masyarakat pedesaan Bondowoso karena tanaman ini dipandang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Walaupun masalah pasang surut harga pasaran tembakau selalu ditentukan pihak pabrikan, sementara petan hanya mengikuti arus nilai pasar tersebut.³²

³² <http://www.dpr.go.id/UU-1992-12.pdf>. Diunduh pada 15 Januari 2019.

Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pengusahaan tanaman tembakau milik petani semakin menemukan bentuknya manakala terbentuk organisasi tani yaitu Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Khususnya di wilayah Jawa Timur APTI didirikan pada tahun 2000 di Surabaya. Adapun latar belakang berdirinya APTI karena adanya keinginan para petani tembakau agar tanaman memiliki jaringan pasar yang lebih terjamin, maka keberadaan APTI dapat menjadi jembatan kemitraan antara petani dengan pihak pabrikan. Hal yang selalu dialami petani, yaitu ketika musim panen tembakau tiba para petani selalu mengalami kesulitan untuk menjual hasil panennya. Lemahnya posisi tawar pada pabrikan besar membuat jual tembakau milik petani tertekan manakala musim panen tiba. Untuk itulah dirasa perlu adanya asosiasi yang bisa mendampingi petani, menjadi pelindung dan mitra. Sehingga dengan berdirinya APTI diharapkan mampu mendorong semangat petani untuk menanam tanaman tembakau nantinya.³³ Adapun, secara spesifik mengenai persoalan peran penting APTI terhadap eksistensi petani tembakau di Kabupaten Bondowoso akan lebih detail dijelaskan pada bab selanjutnya, dan tentunya ini akan menjadi kajian yang cukup menarik dan penting bagi kemajuan masyarakat, khususnya para petani tembakau.

³³ Amin Subarkah, "APTI Jatim Siap di Barisan Terdepan", dalam Moch. Samsul Arifin, *Op.cit.*, hlm. 89-90.

BAB 4

KESIMPULAN

Secara keseluruhan skripsi ini menjelaskan tentang eksistensi APTI terhadap petani tembakau di Bondowoso. Oleh karena Bondowoso merupakan salah satu sentra tembakau rakyat di Jawa Timur. Akan tetapi faktor kesejarahan munculnya petani tembakau tidak bisa dihilangkan begitu saja. Di Bondowoso sejarah adanya perusahaan perkebunan tembakau Milik penguasaha Belanda, mengakibatkan banyak rakyat pribumi dipaksa untuk mengolah lahan di perkebunan tembakau di daerah Karesidenan Besuki, seperti Jember dan Bondowoso, dan mereka-pun menjadi buruh pekerja di perkebunan tembakau. Akhirnya mereka secara turun-temurun terus menempati tempat tersebut sehingga terbentuk lingkup pedesaan yang berada di wilayah perkebunan tembakau, sedang masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai petani. Lambat laun masyarakat Madura yang bekerja di perkebunan tembakau, mulai menanam tembakau secara mandiri.

Tanaman tembakau rakyat dalam perkembangannya semakin mendapat perhatian dari pemerintah seperti Dinas Perkebunan karena dipandang memiliki potensi ekonomi yang besar. Sebagaimana pada Era Orde Baru merupakan era pembangunan bagi Indonesia. Oleh karenanya pihak Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian menempatkan sector pertanian, seperti pertanian tanaman pangan dan

perkebunan menjadi prioritas pembangunan karena dipandang memiliki potensi ekonomi yang besar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditi tembakau rakyat pihak pemerintah, khususnya Dinas Perkebunan juga ikut terlibat langsung. Tindakan yang dilakukan Dinas Perkebunan yaitu dengan cara membentuk PMU (Proyek Manajemen Unit) berbasis komoditi tanaman perkebunan, seperti tembakau, tebu dan kopi.

Turut campur pemerintah dalam pengusahaan tanaman tembakau milik petani semakin menemukan bentuknya manakala terbentuk organisasi tani yaitu Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Khususnya di wilayah Jawa Timur APTI didirikan pada tahun 2000 di Surabaya. Adapun latar belakang berdirinya APTI karena adanya keresahan para petani tembakau pada saat musim tanam dan panen tembakau.

Ketika pemerintah secara langsung turut ikut campur dan memberikan peran penting dalam pengusahaan tanaman tembakau terhadap petani, akibatnya secara lambat laun tanaman tembakau di Bondowoso semakin mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada dasarnya tanaman tembakau juga mempunyai sifat yang sangat khusus seperti tanaman ekspor yang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanaman tembakau rakyat yang ada di Indonesia sangat memiliki kontribusi penting dalam penyumbang devisa Negara karena tanaman tembakau rakyat memiliki areal yang tidak kalah luasnya dengan perkebunan tembakau milik pemerintah, begitu pula dalam hasil produksinya.

Sejak berdirinya APTI di Jawa Timur hal ini kemudian memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan tanaman tembakau rakyat. Seperti halnya eksistensi tanaman tembakau rakyat di Kabupaten Bondowoso yang semakin berkembang. Perkembangan tembakau rakyat di Bondowoso kemudian memberikan respon positif kepada para petani untuk membentuk sebuah organisasi tani yang berbasis komoditi tembakau. Dalam rangka untuk meninjau dan mendampingi perkembangan tanaman tembakau rakyat, maka pada tahun 2001 perwakilan petani tembakau di Kabupaten Bondowoso secara mufakat telah

mendirikan sebuah perkumpulan petani tembakau. Tepatnya pada hari rabu 23 Mei 2001 terbentuklah Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso (APTB).

Kendatipun jelas bahwa Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso menjadi penting keberadaanya, terutama dalam melindungi dan menjembatani aspirasi petani tembakau. Bagaimanapun juga tembakau sudah menjadi bagian dari tanaman tradisi masyarakat, maka menjadi suatu kemustahilan bagi pemerintah untuk mematikan usahatani tersebut. Meski sering pula pemerintah mengeluarkan peraturan yang terkesan mendiskreditkan dan memojokkan petani tembakau maupun industri rokok nasional.

Seiring berjalan waktu yang cukup panjang, keberadaan Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso kemudian mengalami pergantian kepengurusan. Pergantian kepengurusan tersebut dilaksanakan pada hari rabu 05 November 2014 yang bertempat di Aula Maesan 1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso yang dihadiri dengan peserta musyawarah sebanyak 61 orang kelompok tani tembakau. Dari hasil musyawarah tersebut terbit sebuah keputusan dan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Bondowoso yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

1 Arsip

- Arsip APTI Bondowoso. 2001. *Kesepakatan Petani Tembakau Bondowoso*. Bondowoso.
- Arsip APTI Bondowoso. 2013. *Laporan Pertanggung jawaban Kerja APTI Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur Periode 2008-2013*.
- Arsip Dewan Pimpinan Nasional APTI. 2014. *Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Nomor 076/Kpts-APTINAS/XI/2014*. Jakarta.
- Arsip Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional No: 076/Kpts-APTINAS/XI/2014. 2014. *Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Bondowoso*.
- Arsip Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. 2012. *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 585/Kpts/SR.120/2/2012 tentang Pemutihan Tembakau Rajangan Varietas Maesan 1, 2 Sebagai Varietas Unggul*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, *Bondowoso Dalam Angka Tahun 2000*. Bondowoso.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, *Bondowoso Dalam Angka Tahun 2001-2014*. Bondowoso.

2 Buku

- Arifien, Moch Samsul. *Tembakau di Persimpangan Jalan*. Surabaya: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. 2013.
- Abdurahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*, Cetakan Pertama. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2007.
- Hariyanto, Sindung. *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Cetakan Kelima. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- _____, Sartono dan Suryo, Djoko. *Sejarah Pekebunan Di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Aditya Media. 1994.
- Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama. 1993
- _____, *Metodologi Sejarah*, Edisi Kedua. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 2003

- _____. *Budayadan Masyarakat*, Edisi Paripurna, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006
- _____. *Penjelasan Sejarah*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2008.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. 1974.
- Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. 2009. *Kajian Revitalisasi Tembakau Ekspor Kabupaten Bondowoso*. Laporan Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Bondowoso.
- Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso. 2012. *Penerapan Budidaya Tembakau yang Baik dan Benar, dan Pendampingan Rintisan Pembentukan Klaster Tembak*. Laporan Penelitian. Bondowoso.
- Laporan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bondowoso. 2012. *Kajian Revitalisasi Tembakau Ekspor Kabupaten Bondowoso*. Laporan Tahunan. Bondowoso.
- Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. 2014. *Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010-2014*. Laporan Akhir Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Bondowoso
- Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. 2014. *Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010-2014*. Laporan Akhir Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Bondowoso.
- Mulyana, Asep (Editor). *Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan*. Jakarta: Leutikaprio. 2015.
- Niel, Robert Van. *Warisan Sistem Tanam Paksa*, dalam Anne Booth, *et.al.*, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: LP3ES. 1988.
- Padmo, Soegijanto dan Djatmiko, Edhie. *Tembakau: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media. 1991.
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres. 1999.
- Radjab, Suryadi. *Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia dan Center For Law and Order Studies. 2013.
- Sajogyo, Sajogyo, dan Pudjiwati. *Sosisologi Pedesaan*. Cetakan Sebelas Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2002.

- Santoso, Kabul. *Tembakau Dibutuhkan dan Dimusuhi*. Jember: Jember University Press. UPT penerbit UNEJ. 2013.
- Sasmita, Nurhadi, *et.al.* *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Yogyakarta: Lembah Manah. 2012.
- Simarmata, Rikardo. *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press. 1970.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012.
- Tjondronegoro, Sediono M.P dan Wiradi, Gunawan. *Dua Abab Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia. 1984.
- Vink, Gerard Juliaan. *Dasar Dasar Usaha Tani di Indonesia*, terj. Ny. Sahertian, Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1984.

3 Majalah, Tesis

- Arifin, Moch Samsul. “Mekanisasi Pengolahan Tanah dan Pasca Panen Tembakau Rajangan Jawa”. *Majalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur*, Surabaya. 2013.
- Aprianto, Tri Chandra. *Dekolonisasi Perkebunan di Jember Tahun 1930an-1960an*. Tesis Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. 2011.
- Aprilia Putri, Erryka, *et.al.*, “Analisis Pendapatan dan Efisiensi Biaya Usahatani Tembakau Maesan 2 di Kabupaten Bondowoso”, *Jurnal JSEP Universitas Jember* Vol. 8 No. 1 Maret 2015.
- Samsul Arifin, Moch, “Mekanisasi Pengolahan Tanah dan Pasca Panen Tembakau Rajangan Jawa”, *Majalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur*, Surabaya 2013.

4 Internet

- <http://www.dpr.go.id/UU-1992-12.pdf>. Diunduh pada 15 Januari 2019.

5 Wawancara

Wawancara dengan KH. Halid, Bondowoso 25 februari 2019.

Wawancara dengan Moh. Yasid, Bondowoso, 16 Agustus 2018.



LAMPIRAN A

PETA KABUPATEN BONDOWOSO



LAMPIRAN B

STRUKTUR ORGANISASI DPC APTI KABUPATEN BONDOWOSO



**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA
(APTI)**

Sekretariat : Kantor Pusat Departemen Pertanian RI - Jl. Huseini RM No. 3 Gedung C Lantai V Ruang 303, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telp. : (021) 93362478, 7819986 Fax. : (021) 7819986 email. aptinas@yahoo.co.id

**STRUKTUR ORGANISAI DPC APTI KABUPATEN BONDOWOSO,
Periode 2014 – 2019**

Ketua	: Muhamad Yasid
Wakil Ketua	: Komaruddin
Sekretaris	: H Nurholish
Wakil Sekretaris	: Iriyanto
Bendahara	: Enno Sahroni
Seksi – seksi :	
1. Kelembagaan	: Muhlis
	: Asnawi
2. Budidaya dan Produksi	: Ahmad Dasuki
	: Joko Suyono
3. Permodalan dan Pemasaran	: Jayus
	: Sunarwi
4. Humas	: H Ismail
	: Mas'ud Iskandar



LAMPIRAN C

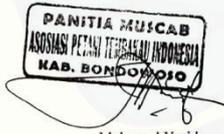
BERITA ACARA PEMBENTUKAN PENGURUS APTI

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PENGURUS ASOSIASI PETANI
TEBBAKAU INDONESIA(APTI) DPC KAB BONDOWOSO
PERIODE TAHUN 2014-2019**

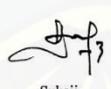
Pada hari ini Rabu tanggal 05 Novemver Tahun Dua Ribu Empat Belas Jam 10..s/d....WIB bertempat di Aula Maesan 1 Dinas Kethutunan dan Perkebunan Kab. Bondowoso, dengan dihadiri peserta musyawarah sejumlah....kelompok tani tembakau yang meliputi...Kecamatan, telah menyepakati terbentuknya dan susunan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia(APTI) Kabupaten Bondowoso dengan masa bakti 2014-2019 seperti di bawah ini :

1. Ketua	: Muhamad Yasid
Wakil Ketua	: Komaruddin
2. Sekretaris	: H. Nurholis
Wakil Sekretaris	: Iriyanto
3. Bendahara	: Enno Sahroni
Seksi seksi :	
1. Seksi Kelembagaan	:Muhlis :Asnawi
2. Seksi Budidaya dan Produksi	:Ahmad Dasuki :Joko Suyanto
3. Seksi Permodalan dan Pemasaran	:Jayus :Sunarwi
4. Seksi Humas	:H. Isma'il :Mashud Iskandar

Tim Formator



Muhamad Yasid
Ketua



Sukaji
Anggota



Nurul Basri
Anggota



Asnawi
Anggota



Muhammad Sinol
Pimpinan Sidang

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH

**PANITIA MUSYAWARAH CABANG
ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA
CABANG BONDOWO**
SEKRETARIAT JI. PENGARANG PEKALANGAN RT 05 RW 01 TENGGARANG
BONDOWOSO

DAFTAR HADIR PESERTA MUSDA APTI BONDOWOSO

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	NOMOR HP
1	Rianto	Wondowan	[Signature]	
2	H Nur Huda	Kosopani	[Signature]	
3	Komala Wahyuningrum	Tenggarrang	[Signature]	
4	Muhammad Hidayat	Pember Belan	[Signature]	
5	Mustaim	Kosopani	[Signature]	
6	Eko Pakriani	Grogogan	[Signature]	
7	Wahid Iskandar	Pond.	[Signature]	
8	[Signature]	Matean	[Signature]	
9	Alimul Abidi	Zakhuaso	[Signature]	
10	KARYONO	PAKUWESI	[Signature]	
11	Hamid	KRETEK	[Signature]	
12	Wahid Yono	KRETEK	[Signature]	
13	TRUFGUTALIMAN	Dauwahan	[Signature]	
14	H. FATMOLLAH	LOJAJAJ	[Signature]	
15	H. Nur Huda	Pakuwesi	[Signature]	085220612
16	Tantri	MATEAN	[Signature]	
17	Budi Yulianto	Nangko	[Signature]	
18	Abdul Fajri	Mandiro	[Signature]	
19	Lauchmanas	Banbaran	[Signature]	
20	MARUW	S. Amjar	[Signature]	
21	KAMARUDIN	SEKARADIN	[Signature]	
22	SUMARWI	Jomban Sari	[Signature]	
23	MITUMPROF	Bondarum	[Signature]	
24	[Signature]	Wondowan	[Signature]	
25	REIS	Pakuh	[Signature]	

26	Abdullohman	Tamanah	[Signature]	
27	Bambang H.	Gebis	[Signature]	
28	SAMSUL ARIFIN	MARSAH	[Signature]	085234955423
29	M. Yusuf	Marsa	[Signature]	081358151708
30	SELYDAN	Kropak	[Signature]	08123682189
31	H. ISMAIL	MADISARIN	[Signature]	085230440284
32	SULIMAN	SEKARADIN	[Signature]	085238102661
33	[Signature]	PAKUWESI	[Signature]	085236382189
34	HOSMAN	TENGGARANG	[Signature]	
35	HODRI	Jepelobek	[Signature]	
36	HASAN	Lojajaj	[Signature]	085271581143
37	AMBIN	PANCOGATI	[Signature]	08520488555
38	Abdullah	Taman	[Signature]	081217422717
39	ABD MUBAS	Tenggarrang	[Signature]	081236716200
40	Tauwanto	Jombansari	[Signature]	085236710200
41	[Signature]	Pakuwesi	[Signature]	081236710200
42	BUSTON MAHMUD	TENGGARANG	[Signature]	081236710200
43	Fathorrahman	Sugal KOR	[Signature]	085330225600
44	H. M. S. Kus	Pakuwesi	[Signature]	081331342917
45	ABDUL HASAN	Kandakman	[Signature]	
46	A BULL HIZI	Lojajaj	[Signature]	085204976798
47	Asnandi	Tegalunjin	[Signature]	085288951043
48	Andriwidhi	TOSOKATI	[Signature]	085229898141
49	M. Sidiq	Mangli	[Signature]	085284859225
50	KUSNATA	Amahdani	[Signature]	085232615247
51	Sumardi	Binal	[Signature]	085331615579
52	[Signature]	Grogogan	[Signature]	081313259747
53	PELMI	ANDUNESAR	[Signature]	085220843581
54	[Signature]	Taman	[Signature]	085236709482
55	Nandjo P.F.	Ukusan: Taman	[Signature]	081358123280
56	[Signature]	Tenggarrang	[Signature]	085331053321
57	Aguswadi	Cerme	[Signature]	085258526129

58	MARTIN SAMSIHO	Marsa	[Signature]	082332576309
59	Tanapi	Lojajaj	[Signature]	081236928781
60	SUBAGSI	Pekalongan	[Signature]	
61	M. YASID	- - -	[Signature]	081236925666
62				
63				

LAMPIRAN D

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR APTI



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : 01-00-00/ 110 /D.IV.I/XII/2016

Memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan Surat Permohonan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia nomor: 010/DPN APTI/E/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Surat Permohonan Pembaharuan SKT Ormas setelah dilakukan penilaian kelengkapan administrasi organisasi dengan ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : **ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI)**
 Tanggal Berdiri : **14 OKTOBER 2000**
 Bidang Kegiatan : **PROFESI**
 NPWP : **03.199.068.2-017.000**
 Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI
 Jl. Harsono RM No.3 Gedung C Lantai 5 Ruang 503
 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550
 Telp/Fax : (021) 7819986 Email : aptinas@yahoo.co.id

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan 30 Desember 2021 apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2016

LA ODE AHMAD P. BOLENGO, AP, M.Si
 DIREKTUR JENDERAL
 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
 DIREKTORAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN


Drs. La Ode Ahmad P. Bolengo, AP, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19740224 199311 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Intelijen Negara;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Kepala BAUNTELKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI;
6. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6. Atsip.

LAMPIRAN E

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR NPWP APTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU

Nomor : 0211.1816131.2816114
 Fax : 0211.29492419

Jalan P3 Panglima No 32 Jakarta 12810
 JAKARTA 12110

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
 Nomor : PEM/13249/WPJ.04/KP/1053/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ.2008, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Nama	ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA											
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 03.199.068.2-017.000											
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	: 85300 - JASA KEGIATAN SOSIAL											
4. Alamat	KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GD. C LT. 5 JL. HARSONO RM BLOK C NO. 3 KEL. RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA RAYA 06000											
b. Merakronim	: -											
6. Status Monev	: SWASTA											
7. Status Usaha	: PUSAT											
8. Kewajiban Pajak	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2)</td> <td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 23</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 15</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 19</td> <td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 26</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> PPh Pasal 22</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2)	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 23	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22	
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2)	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 23											
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25											
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 26											
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29											
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22												

telah terdaftar pada laba usaha kami

Jakarta, 27 Desember 2011
 A n Kepala Kantor,
 Kepala Seksi Pelayanan,

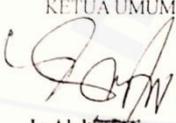
 Wadino
 NIP. 196107191986021001

*) Untuk pengisian perlu



LAMPIRAN F

**SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DEWAN PENGURUS DPC
APTI KABUPATEN BONDOWOSO**

	<p>DEWAN PIMPINAN NASIONAL SOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI)</p>	
<p><small>Sekretariat : Kantor Pusat Departemen Pertanian RI Jl. Harsono RM No. 3 Gedung C Lantai V Ruang 503, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telp : (021) 93362478, 7819986 Fax : (021) 7819986 email: aptinas@yahoo.co.id</small></p>		
<p>SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL NOMOR : 076/Kpts-APTINAS/XI/2014 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) KABUPATEN BONDOWOSO</p>		
Menimbang	: Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program kerja APTI, maka perlu Musyawarah Kepengurusan Daerah di tingkat Kabupaten.	
Mengingat	: 1. Anggaran Dasar (AD) Pasal 17 ayat 17, Anggaran Rumah Tangga (ART) APTI, Pasal 8 ayat 2, 2. Berita acara hasil musyawarah pembentukan pengurus Asosiasi Petani Tembakau Kabupaten Bondowoso pada Hari Rabu, tanggal 05 Nopember 2014, Jam 10.00 -14.00 WIB, bertempat, di Aula Maesan I Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso	
Menetapkan	: MEMUTUSKAN	
PERTAMA	: Mengangkat nama-nama tersebut dalam Lampiran, sebagai pengurus DPC APTI Kabupaten Bondowoso	
KEDUA	: Setelah menerima surat keputusan ini agar segera melaksanakan tugas sebagai Pengurus DPC APTI Kabupaten Bondowoso	
KETIGA	: Selama menjadi Pengurus DPC APTI Kabupaten Bondowoso wajib melaksanakan koordinasi dengan Kepengurusan APTI Nasional.	
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan keputusan ini akan ditinjau kembali.	
Ditetapkan	: Jakarta	
Pada tanggal	: 22 Desember 2014	
Oleh:	Dewan Pimpinan Nasional	
<p>KETUA UMUM</p>  <p>Ir. Abdus Salam</p>		<p>SEKRETARIS JENDERAL</p>  <p>Budidoyo, SE</p>

LAMPIRAN G

SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan:

I. Nomor dan tanggal permohonan : C0201200018, 03 Januari 2012

II. Pencipta
Nama : ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI)
Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI Gedung C Lantai 5, Jalan Harsono RM No.3, Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.

Kewarganegaraan : -

III. Pemegang Hak Cipta
Nama : ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI)
Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI Gedung C Lantai 5, Jalan Harsono RM No.3, Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.

Kewarganegaraan : -

IV. Jenis Ciptaan : Seni Logo

V. Judul Ciptaan : ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI)

VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 04 Juli 2008, di Jakarta

VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

VIII. Nomor pendaftaran : 061161

Jakarta, 01 November 2012
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.d.
DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG

Yulislar Ningsih, S.H., M.H.
NIP. 195511291982032001

02-01.000002433

Lampiran 1
Peraturan Menteri Kehakiman RI
Nomor : M.61-IC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

Nomor Agenda :
00201200018

I. Pencipta:
1. Nama : ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI).
2. Kewarganegaraan : INDONESIA
3. Alamat : Kantor Pusat KEMENTERIAN PERTANIAN RI
GEDUNG C Lt.5 Jl. Harsono RM no.3
Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12550.

II. Pemegang Hak Cipta:
1. Nama : ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI).
2. Kewarganegaraan : INDONESIA
3. Alamat : Kantor Pusat KEMENTERIAN PERTANIAN RI
GEDUNG C Lt.5 Jl. Harsono RM no.3
Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12550.

III. Kuasa :
1. Nama :
2. Kewarganegaraan :
3. Alamat :

IV. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan : LOGO
ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI).

V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 Juli 2008 di Jakarta.

VI. Uraian ciptaan :
LOGO berbentuk segi empat dengan lima warna.
- Bujur sangkar, warna merah - Komoditi
- Segi empat, warna putih - Proses
- Tulisan putih APTI - Singkatan Asosiasi.
wajah mengesjahterakan petani tembakau.
"Sejahterakan Petani Tembakau Indonesia."

MAKNA LOGO :
"Sejahterakan Petani Tembakau Indonesia."

Jakarta, 27 Desember 2011.

Norma Lengkong i.c. ABDUS SETIAWAN
Ketua Umum APTI

SUDI SUPRANTO
NIP. 1955051980031001

LAMPIRAN H

ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA**

Sekretariat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI Jl. Harsono RM No. 3 Gedung C Lantai 5 Ruang 503,
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telp/Fax : (021) 7819986 email: aptinas@yahoo.co.id

Nomor : 05/DPN APTI/E/II/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Permohonan Petikan

Jakarta, 24 Februari 2017

Yth. Kepala Dirjen Haki Kemenkumham RI
Bapak Prof. Dr. AHMAD M RAMLI, S.H., M.H., FCBArb
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, RT.16/RW.4, Karet Kuningan,
Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Kami dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) ingin mengajukan permohonan petikan hak cipta sebagai berikut :

Nomor Permohonan Hak Cipta	: C00201200018,
Tanggal Pendaftaran Ciptaan	: 03 Januari 2012
Jenis Ciptaan	: Seni Logo
Pencipta	
Nama	: Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)
Alamat	: Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Gedung C lantai 5 Jl. Harsono RM No.3 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550.
Kewarganegaraan	: -
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)
Alamat	: Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Gedung C lantai 5 Jl. Harsono RM No.3 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550.
Kewarganegaraan	: -
Tanggal dan tempat ciptaan	
Diumumkan pertama kali	: 04 Juli 2008, di Jakarta

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA
(APTI)**


Soeseno
Ketua Umum


Wening Swasono
Sekretaris Jenderal





15:49:22***AFIAH***100,000,00***411***28/02/2017T...
 C00201200018/ID000061161***ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA
 Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Ciptaan***28/02/2017

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI NARASUMBER DAN PENULIS



Foto bersama dengan DPC APTI Bondowoso
Sumber: Hasil Foto Pribadi di Kantor DPC APTI Bondowoso 19 Maret 2019



Foto bersama anggota Kelompok Tani Tembakau
Sumber: Hasil Foto Pribadi di Lahan Penanaman Tembakau



Foto tembakau rajang kasturi siap panen
Sumber: Hasil Foto Pribadi



Foto bantuan hibah pupuk kepada petani
Sumber: Koleksi Foto Pribadi

SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami:

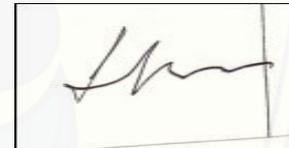
Nama : H. Hafid
Pekerjaan : Petani dan Wiraswasta
Alamat : Desa Tenggarang
Umur : 52 Tahun

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul "*Eksistensi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Cabang Bondowoso Tahun 2001-2014*".

Dengan demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Bondowoso, 25 Februari 2019

Responden



H. Hafid

HASIL WAWANCARA

Di Kabupaten Bondowoso sebagian masyarakatnya adalah sebagai petani. Mereka terbiasa menanam tanaman pertanian, seperti padi, jagung, tembakau dan lain-lain. Namun yang menjadi tanaman andalan bagi masyarakat Bondowoso adalah tanaman tembakau. Para petani tembakau di Bondowoso sudah mengenal dan menanam tembakau secara turun temurun dari nenek moyang. Terlebih lagi pada masa penjajahan Belanda daerah Bondowoso juga didirikan perkebunan tembakau. Tanaman tembakau di Bondowoso menjadi tanaman andalan karena masih memiliki nilai jual harga yang cukup mahal dibanding dengan tanaman pertanian lain seperti jagung, padi dan lain-lain. Dengan harga jual tembakau yang cukup mahal maka para petani di Bondowoso memiliki daya minat yang tinggi ketika menanam tembakau. Terlebih lagi di Kabupaten Bondowoso juga banyak pabrikan rokok lokal yang bisa menampung semua hasil panen milik petani tembakau di Bondowoso. Meski tembakau juga merupakan tanaman yang cukup sulit karena membutuhkan pemeliharaan yang rumit, tapi petani tembakau di Bondowoso tetap menjadikan tanaman andalan karena ketika musim panen tiba hasilnya juga memberikan pendapatan yang lumayan tinggi dan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

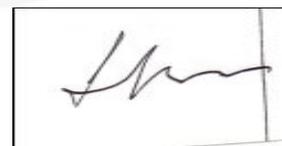
Para petani tembakau di Bondowoso juga semakin semangat dalam menanam tembakau sejak dibentuk Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso (APTB) pada tahun 2001. Dengan berdirinya APTB memberikan dampak positif terhadap perkembangan tanaman tembakau di Bondowoso. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin luasnya areal tanaman tembakau yang ditanam oleh petani. Ketika didirikan APTB pada tahun 2001 saya dipilih sebagai ketua umum. Sebuah tanggung jawab besar bagi saya menjabat sebagai ketua APTB karena harus bisa mendampingi petani tembakau di Bondowoso. Sebagai organisasi yang secara langsung menjadi perwakilan para petani tembakau, maka keberadaan APTB harus bisa memberikan manfaat bagi perkembangan pertanian tanaman tembakau di Kabupaten Bondowoso. Salah satu aktivitas utama yang dilakukan APTB adalah dengan melakukan pendampingan terhadap cara tanam

tembakau yang baik agar memiliki kualitas yang bagus pada musim panen, sehingga memiliki daya jual yang tinggi dipasaran. Selain itu APTB juga berperan penting untuk menjadi jembatan antara petani dengan pabrikan rokok. Hal ini dilakukan agar terjalin kemitraan yang baik antara petani dengan pabrikan rokok. Dengan terjalinnya kemitraan maka petani tembakau Bondowoso juga memiliki kepastian pasar dalam memasarkan hasil panennya. Terlebih lagi Bondowoso merupakan salah satu sentra tanaman tembakau rakyat maka hasil panennya juga melimpah. Oleh karena itu dibutuhkan pasar atau pabrik yang cukup banyak untuk menampung semua hasil panen tembakau petani tembakau di Bondowoso. Alhamdulillah di Bondowoso masih memiliki 37 pabrik rokok lokal yang dapat menampung semua hasil panen tembakau milik petani di Bondowoso.

Adanya APTB juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan tanaman tembakau Bondowoso. Dalam rangka untuk menjaga kualitas hasil panen tembakau petani, maka APTB juga melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Pertanian dalam melakukan pembinaan dan monitoring rencana areal tanaman tembakau yang sesuai dengan kebutuhan pabrikan rokok. Alhasil pada tahun 2012 usaha terbut juga membuahkan hasil yang cukup penting. Dimana sejak tahun 2012 pihak Dinas Pertanian Bondowoso mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemutihan Tembakau Rajangan Varietas Maesan 1, 2 Sebagai Varietas Unggul. Dengan demikian hasil panen tembakau petani Bondowoso sudah memiliki brand penjualan yang sudah diakui oleh pabrikan rokok, sehingga petani semakin memiliki kepercayaan yang tinggi dalam menanam tanaman tembakau.

Bondowoso, 25 Februari 2019

Responden



H. Hafid

SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami:

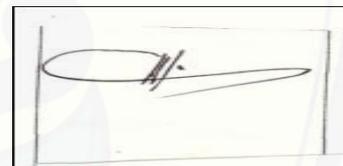
Nama : M. Yasid
Pekerjaan : Petani dan Wiraswasta
Alamat : Desa Tenggarang
Umur : 51 Tahun

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul "*Eksistensi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Cabang Bondowoso Tahun 2001-2014*".

Dengan demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Bondowoso, 16 Agustus 2018

Responden



M. Yasid

HASIL WAWANCARA

Ketika APTB berdiri pada tahun 2001 saya terpilih sebagai sekretaris waktu itu. Dengan menjadi anggota APTB juga memiliki tanggung jawab yang penting dalam mengembangkan usaha tanaman tembakau di Bondowoso. Dimana sebagian besar masyarakat Bondowoso adalah petani tembakau, maka usahatani tembakau juga harus mendapat perhatian agar semakin maju dan bisa menjadi salah satu faktor penting dalam menopang perekonomian masyarakat. Sejak berdirinya APTB maka memberikan dampak yang positif karena APTB menjadi salah satu organisasi tani yang cukup penting bagi usahatani tembakau di Bondowoso. Dengan demikian maka APTB juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan nasib petani. Terlebih lagi tanaman tembakau masih menjadi tanaman primadona bagi masyarakat Bondowoso. Oleh karenanya hubungan pihak petani dengan pabrikan rokok harus terjalin dengan baik dan saling menguntungkan. Sebagaimana perannya untuk melindungi petani, maka sejak berdiri APTB juga mengemban tugas penting terhadap petani. Adapun salah satu tugasnya yakni, APTB memiliki peran untuk menjembatani petani dengan pemerintah dalam hal bantuan terkait komoditi tanaman tembakau, seperti penyuluhan program intensifikasi mutu tembakau.

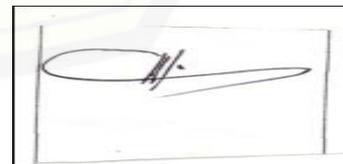
Dalam perkembangannya APTB juga mengalami pergantian struktur organisasi. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional APTI secara resmi APTI di Bondowoso berganti kepengurusan pada tahun 2014. Musyawarah pergantian pengurus APTI Bondowoso dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 yang bertempat di Aula Maesan 1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso. Musyawarah daerah tersebut dihadiri oleh 61 anggota kelompok tani tembakau yang meliputi 16 kecamatan. Hasil musyawarah daerah APTI Kabupaten Bondowoso menghasilkan susunan kepengurusan masa bakti tahun 2014-2019 yang mana pada waktu itu saya adalah sebagai ketua umum. Keberadaan APTI Bondowoso juga memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan petani tembakau. Dimana APTI juga memiliki peran penting yang bisa menjembatani pihak Dinas Pertanian dengan petani

tembakau untuk melakukan berbagai macam pembinaan dan memberikan bantuan hibah kepada petani, seperti bantuan mesin rajang, perajang manual, hand tractor, pupuk, dan terpal. Dengan adanya bantuan tersebut petani juga merasa diuntungkan karena beban modal petani juga semakin ringan. Mengingat modal tanaman tembakau membutuhkan modal tanam dan perawatan yang cukup tinggi, maka bantuan pemerintah yang sangat dibutuhkan tentunya.

Sejak berdirinya APTI di Bondowoso tentu juga memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani tembakau. Salah satu langkah penting yang dilakukan APTI Bondowoso adalah dengan adanya kemitraan antara pabrik rokok dengan petani tembakau. Dengan adanya pola kemitraan tersebut memberikan pengaruh positif terhadap nilai jual tembakau milik petani Bondowoso. Terlebih tanaman tembakau memiliki kualitas tembakau yang baik maka harga jualnya juga mahal. Oleh karena itu APTI selalu berupaya memberikan pendampingan kepada petani agar menanam dan menjaga tanaman tembakau dengan baik agar kualitas panennya tetap terjaga, sehingga harga jualnya juga mengalami kenaikan. Meski berbagai pembinaan dan program kerja yang dilakukan APTI tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan petani mengingat harga jual tembakau selalu dikendalikan oleh pemilik modal, namun pihak APTI tetap terus berjuang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat petani tembakau di Bondowos

Bondowoso, 16 Agustus 2018

Responden



M. Yasid